

# BAB I

PEREKONOMIAN INDONESIA:  
PENGARUH GLOBAL, KINERJA  
DOMESTIK DAN RESPONS  
KEBIJAKAN



## BAB I

# Perekonomian Indonesia: Pengaruh Global, Kinerja Domestik dan Respons Kebijakan



*Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 terus membaik, didukung oleh permintaan domestik yang solid dan kondisi eksternal yang kondusif. Pemulihan ekonomi global yang berangsur mulai terjadi sejak paruh pertama 2009 masih terus berlanjut di tahun 2010, ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging markets. Sejalan dengan proses perbaikan tersebut, harga komoditas global terus menunjukkan peningkatan sehingga meningkatkan tekanan inflasi, khususnya di negara-negara emerging markets. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju relatif masih terbatas dengan tekanan inflasi yang masih rendah. Kondisi tersebut mendorong negara-negara emerging markets mulai menempuh kebijakan moneter yang ketat baik melalui kebijakan makroprudensial maupun melalui peningkatan suku bunga acuan. Sebaliknya negara-negara maju cenderung menerapkan kebijakan moneter yang masih longgar dengan mempertahankan tingkat suku bunga pada level yang rendah, bahkan beberapa negara maju melakukan injeksi likuiditas yang cukup besar (quantitative easing). Perbedaan kinerja dan respons kebijakan antara negara-negara emerging markets dan negara-negara maju mengakibatkan derasnya arus modal masuk ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia.*

*Di tengah kondisi perekonomian global yang semakin kondusif tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 tumbuh mencapai 6,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,6%. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut didukung oleh peran investasi dan ekspor yang*

*meningkat. Peningkatan investasi pada tahun 2010 semakin menggembirakan mengingat sifatnya yang menambah kapasitas perekonomian sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya peran investasi nonbangunan, khususnya investasi mesin. Sementara itu, perbaikan kinerja ekspor juga diikuti oleh semakin terdiversifikasinya komoditas dan pasar tujuan ekspor. Hal ini tercermin pada membaiknya kinerja sektor-sektor yang menghasilkan komoditas yang diperdagangkan secara internasional (tradable sector), khususnya industri pengolahan. Meskipun demikian, sektor nontradable masih menjadi sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.*

*Perkembangan yang kondusif di perekonomian global tersebut mendukung kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2010. Pada tahun laporan, NPI mencatat surplus yang cukup besar mencapai 30,3 miliar dolar AS, baik yang bersumber dari transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Ekspor mencatat pertumbuhan yang tinggi sehingga mampu mempertahankan surplus transaksi berjalan di tengah impor dan pembayaran transfer pendapatan yang meningkat tajam. Sementara itu, seiring dengan kuatnya aliran masuk modal asing, neraca transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang sangat besar dengan komposisi yang semakin membaik. Hal ini tercermin dari kuatnya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung (FDI) yang meningkat tajam, di samping investasi dalam bentuk portofolio yang juga meningkat cukup signifikan. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar 96,2 miliar dolar AS, cukup*



*memadai untuk mendukung kebutuhan impor dan kewajiban eksternal, serta memberikan keyakinan dalam menjaga stabilitas nilai tukar.*

*Sejalan dengan perkembangan NPI tersebut, nilai tukar rupiah mencatat apresiasi dan disertai volatilitas yang cukup rendah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat 3,8% dibanding dengan akhir tahun 2009 menjadi Rp 9.081 per dolar AS. Kinerja nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya peringkat utang Pemerintah dan indeks risiko yang membaik. Apresiasi nilai tukar rupiah pada tahun laporan juga cukup moderat dibandingkan dengan negara-negara kawasan sehingga tidak mengganggu kinerja ekspor secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dalam mengelola arus masuk modal asing dalam rangka memperkuat daya tahan perekonomian dalam menghadapi pembalikan arus modal jangka pendek.*

*Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2010 tercatat 6,96%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 5%±1%. Sampai dengan pertengahan tahun laporan, stabilitas harga masih cukup terjaga sebagaimana tercermin dari inflasi yang relatif rendah (5,05%). Memasuki triwulan III 2010, intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan, meningkat tajam akibat anomali cuaca baik di tingkat global maupun domestik. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga komoditas pangan di pasar global, dan dalam waktu yang bersamaan kenaikan yang tinggi pada harga-harga komoditas tersebut juga terjadi di pasar*

*domestik. Komoditas bahan pokok seperti beras dan aneka bumbu memberi kontribusi kenaikan harga yang sangat besar sehingga inflasi kelompok volatile food mencapai 17,74%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,95%. Meski pada tahun laporan terdapat lonjakan inflasi volatile food, inflasi inti tetap terjaga pada level yang cukup rendah, yaitu 4,28%. Hal ini didukung oleh terkendalinya faktor fundamental sebagaimana diindikasikan oleh nilai tukar rupiah yang menguat, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta kapasitas perekonomian yang sejauh ini masih dapat memenuhi peningkatan permintaan. Sementara itu, kelompok administered prices menunjukkan inflasi yang moderat, yaitu sebesar 5,40%.*

*Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2010 tetap terjaga. Industri perbankan semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang rendah. Selain itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 22,8%. Kinerja pasar saham dan pasar obligasi didukung oleh menurunnya risiko investasi dan relatif menariknya imbal hasil sehingga menarik masuknya arus modal asing ke instrumen tersebut. Di pasar saham, meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditopang oleh membaiknya kinerja laporan keuangan emiten dan struktur pasar yang semakin kondusif. Perkembangan tersebut mendorong IHSG mencatat kenaikan tertinggi di kawasan. Di pasar obligasi, perbaikan tercermin dari peningkatan volume perdagangan dan penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sejak awal tahun, yang antara lain disebabkan*

*oleh kesinambungan fiskal yang relatif terjaga. Di pasar uang, likuiditas meningkat dan suku bunga cenderung mengarah ke batas bawah koridor. Hal ini mengindikasikan melimpahnya likuiditas di sektor perbankan dan preferensi perbankan yang masih cenderung menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen jangka pendek.*

*Berbagai perkembangan di atas tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia mengarahkan penerapan kebijakan moneter pada upaya pencapaian sasaran inflasi dan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan arah kebijakan ini, Bank Indonesia menjaga BI Rate pada*

*level yang selaras antara pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menempuh langkah bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam rangka mengelola likuiditas perbankan dan arus masuk modal asing. Kebijakan perbankan dan sistem pembayaran diarahkan pada peningkatan ketahanan, efisiensi, dan fungsi intermediasi perbankan, serta menjamin terciptanya sistem pembayaran yang efisien, handal, mudah dan aman. Sementara itu, kebijakan pemerintah diarahkan pada upaya memperkuat daya dukung perekonomian yang lebih bersifat struktural melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi, mengatasi gangguan pasokan bahan pangan, serta menjaga daya beli masyarakat.*

## 1.1

# Perekonomian Global



Pemulihan ekonomi global yang dimulai sejak pertengahan tahun 2009 terus berlanjut di sepanjang tahun 2010. Perekonomian dunia yang tumbuh tinggi pada awal tahun membawa nuansa optimisme pada percepatan pemulihan ekonomi global. Namun, terpaan krisis utang di beberapa negara Eropa dan fundamental ekonomi negara-negara maju yang dibayangi tingginya angka pengangguran menyebabkan momentum pemulihan ekonomi yang melemah, terutama sejak triwulan II 2010. Sebaliknya, pemulihan ekonomi di negara-negara *emerging markets* berada dalam arah yang menguat, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia diwarnai ketidakseimbangan kecepatan pemulihan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*. Walaupun demikian, secara keseluruhan perekonomian dunia pada tahun 2010 tumbuh lebih tinggi dari perkiraan semula. Lembaga keuangan internasional, seperti IMF, beberapa kali melakukan revisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia selama tahun 2010 seiring dengan lebih tingginya angka-angka realisasi pertumbuhan ekonomi dunia dari awal sampai menjelang akhir tahun (Tabel 1.1).

Ekspansi perekonomian negara-negara *emerging markets* yang menguat menjadi faktor yang berkontribusi positif pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Konsumsi domestik yang menguat disertai kinerja ekspor yang cukup baik, mendorong ekonomi negara-negara *emerging markets* tumbuh tinggi. IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging markets* sebesar 7,1% di tahun 2010. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju berada pada kecepatan yang relatif lebih moderat, ditopang oleh pemberian stimulus fiskal dan moneter. Secara umum, konsumsi rumah tangga mulai membaik tercermin dari pertumbuhan positif penjualan eceran sejalan dengan perbaikan di sisi pendapatan dan membaiknya pasar tenaga kerja. Namun, prospek konsumsi rumah tangga masih terbebani oleh tingginya angka pengangguran dan memburuknya ekspektasi ekonomi ke depan. Sementara itu, sektor industri mulai tumbuh meski dengan laju yang relatif moderat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju selama tahun 2010 diprakirakan mencapai 3,0%.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dunia menunjukkan perkembangan yang meningkat cukup tinggi. Volume perdagangan dunia tahun 2010 tumbuh 12,0%, setelah mengalami kontraksi di tahun sebelumnya sebesar 11% (Grafik 1.1). Ekonomi negara-negara berkembang yang memiliki basis perdagangan yang kuat menjadi motor peningkatan volume perdagangan dunia tersebut. Selain itu, semakin terintegrasinya perdagangan antarnegara berkembang turut berpengaruh besar pada meningkatnya volume perdagangan, sehingga imbas dari lebih lambatnya kinerja perekonomian negara-negara maju relatif minimal.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi global pada gilirannya berkontribusi pada meningkatnya harga komoditas

**Tabel 1.1** Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2010

persen

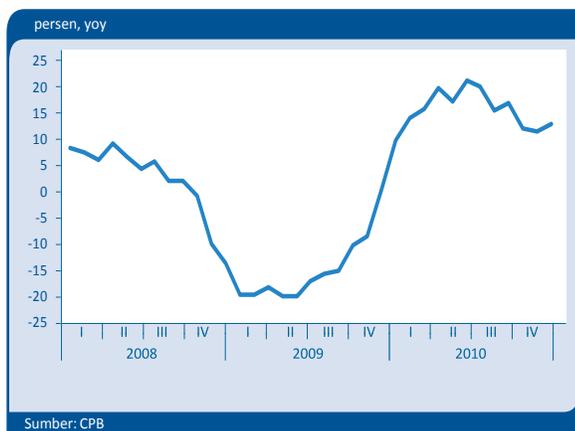
Kelompok Negara	Periode Proyeksi					
	Okt-09	Jan-10	Apr-10	Jul-10	Okt-10	Jan-11
Dunia	3,1	3,9	4,2	4,6	4,8	5,0
Negara maju	1,3	2,1	2,3	2,6	2,7	3,0
Amerika Serikat	1,5	2,7	3,1	3,3	2,6	2,8
Uni Eropa	0,3	1,0	1,0	1,0	1,7	1,8
Jepang	1,7	1,7	1,9	2,4	2,8	4,3
Negara <i>emerging markets</i> dan berkembang	5,1	6,0	6,3	6,8	7,1	7,1
Negara persemakmuran Eropa Timur	2,1	3,8	4,0	4,3	4,3	4,2
Asia	7,3	8,4	8,7	9,2	9,4	9,3
China	9,0	10,0	10,0	10,5	10,5	10,3
India	6,4	7,7	8,8	9,4	9,7	9,7
ASEAN-5	4,0	4,7	5,4	6,4	6,6	6,7
<b>Volume Perdagangan Dunia (barang dan jasa)</b>	<b>2,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>9,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,0</b>

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*

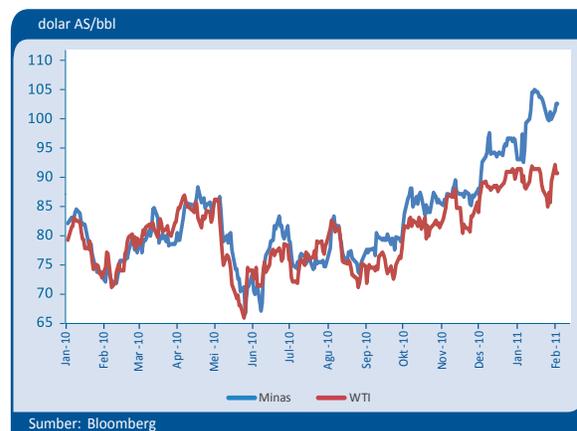
global. Permintaan minyak dunia mengalami kenaikan dan memicu naiknya harga minyak yang signifikan. Hal ini terlihat pada berbagai laporan lembaga energi internasional seperti *International Energy Agency* (IEA) dan *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) yang beberapa kali melakukan revisi ke atas terhadap prakiraan kenaikan permintaan minyak dunia pada tahun 2010. Rata-rata harga minyak jenis *West Texas Intermediate* (WTI) dan Minyak Nasional (Minas) untuk tahun 2010 masing-masing mencapai 79,4 dolar AS dan 81,1 dolar AS perbarel (Grafik 1.2). Di sisi lain, walaupun tidak setinggi peningkatan harga migas, harga

komoditas nonmigas di tahun 2010 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Peningkatan harga tersebut terutama terjadi pada harga komoditas di sektor pertanian dan pertambangan (Grafik 1.3). Kebijakan negara-negara maju yang mempertahankan suku bunga rendah disertai melemahnya nilai tukar dolar AS memicu masuknya arus dana global ke pasar komoditas sehingga turut memengaruhi peningkatan harga komoditas global tersebut.

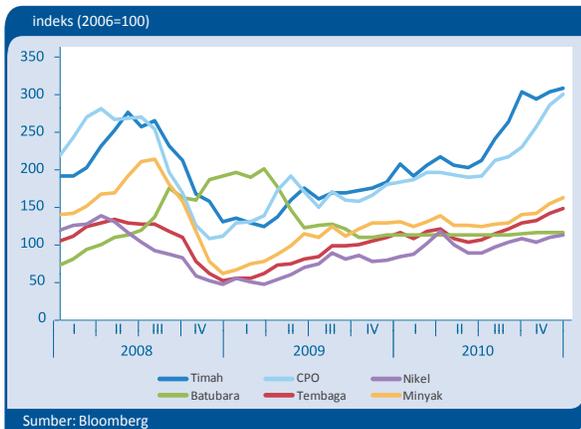
Perkembangan harga komoditas dan permintaan global yang menguat secara keseluruhan pada akhirnya



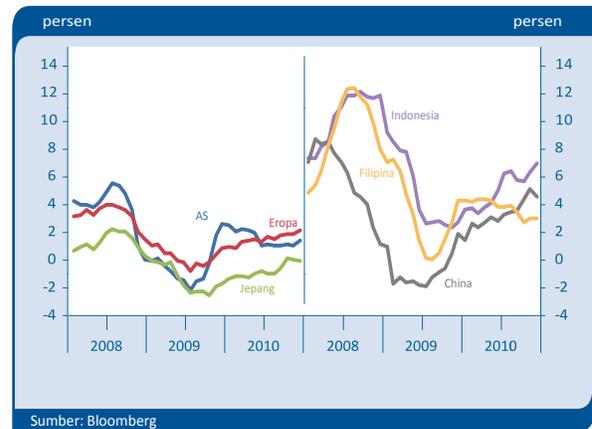
**Grafik 1.1** Volume Perdagangan Dunia



**Grafik 1.2** Perkembangan Harga Minyak



Grafik 1.3 Perkembangan Harga Komoditas



Grafik 1.4 Inflasi Negara Maju dan Berkembang Asia

berdampak pada meningkatnya inflasi global. Kenaikan tekanan inflasi yang lebih tinggi terjadi di negara-negara *emerging markets* seiring dengan menguatnya permintaan yang berdampak pada kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga pangan yang dipicu oleh terjadinya penurunan produksi akibat anomali cuaca di berbagai negara, khususnya Asia, juga turut mendorong naiknya tekanan inflasi, terutama di pertengahan tahun 2010. Sementara itu, inflasi di negara-negara maju relatif stabil seiring dengan masih rendahnya akselerasi pemulihan ekonomi. Pada tahun 2010, inflasi di negara-negara *emerging markets* mencapai 5,54%, sementara inflasi di negara-negara maju sebesar 1,44%. (Grafik 1.4.)

Di pasar keuangan global, perkembangan sepanjang tahun 2010 memperlihatkan adanya perbaikan, meskipun masih dibayangi risiko ketidakpastian. Berkebalikan dengan kondisi sektor riil, perkembangan pasar keuangan di awal tahun justru diwarnai oleh turunnya *risk appetite*

investor global akibat krisis PIIGS<sup>1</sup> yang mengakibatkan investor global menghindari aset-aset yang dipandang berisiko. Pada paruh pertama tahun 2010, krisis utang yang melanda PIIGS memicu terjadinya keketatan dan kekhawatiran di pasar keuangan global sehingga pasar keuangan global terkoreksi cukup dalam. Namun, memasuki paruh kedua tahun 2010 risiko mulai mereda dan terus mengalami perbaikan terutama di negara-negara *emerging markets*, sebagaimana tercermin pada *Composite Sovereign Indices* yang menurun (Grafik 1.5). Sementara itu, risiko investasi di negara-negara maju masih terindikasi memburuk di paruh kedua. Langkah penanganan krisis fiskal yang ditempuh oleh *European Commission* (EC) bersama dengan IMF, disertai sinyal kebijakan moneter negara-negara maju yang akomodatif pada akhirnya dapat kembali mendorong bangkitnya pasar keuangan global. Bursa saham di negara-negara maju

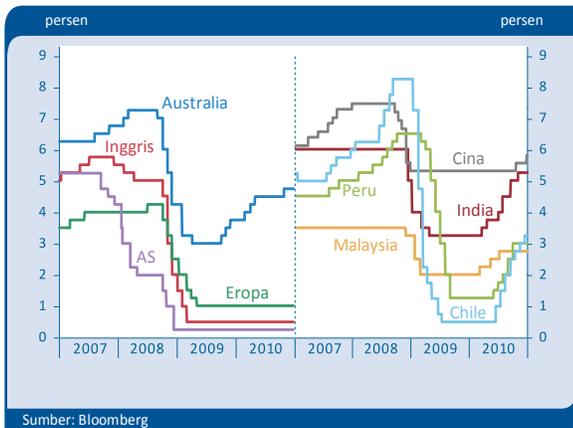
1 Negara Portugal, Irlandia, Italia, Yunani, dan Spanyol



Grafik 1.5 Composit Sovereign Indices (Markit ITraxx)



Grafik 1.6 Bursa Saham Global



**Grafik 1.7 Suku Bunga Kebijakan**

mulai menunjukkan perbaikan, walaupun tidak sebaik kinerja bursa saham di negara-negara *emerging markets* (Grafik 1.6). Namun, krisis fiskal yang dialami Irlandia pada akhir tahun 2010 yang sempat kembali menurunkan sentimen pelaku pasar dan memicu keketatan likuiditas di Eropa mengindikasikan masih tingginya risiko ketidakpastian.

Dari sisi kebijakan ekonomi, kesenjangan perkembangan perekonomian dan pasar keuangan global direspons secara berbeda oleh negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*. Kebijakan moneter di negara-negara maju cenderung lebih longgar sebagai upaya meminimalisasi tekanan di pasar keuangan dan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Selain itu, beberapa bank sentral utama di negara-negara maju, seperti Federal Reserve, Bank of Japan, dan Bank of England, juga melanjutkan pelonggaran moneter melalui pembelian surat-surat berharga (*quantitative easing*).

Meskipun demikian, beberapa negara maju yang kembali mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi mulai menaikkan suku bunga kebijakan, antara lain Australia, Kanada, Swedia, dan Selandia Baru. Sementara itu, dalam menghadapi tekanan inflasi yang meningkat, bank sentral di negara-negara *emerging markets* cenderung menerapkan normalisasi kebijakan melalui peningkatan suku bunga, seperti yang dilakukan Chili, Brazil, Peru, India, Malaysia, Thailand, dan China (Grafik 1.7).

Perbedaan respons kebijakan antara negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets* merupakan salah satu faktor pemicu derasnya aliran modal ke negara-negara *emerging markets*. Melimpahnya likuiditas di negara-negara maju di tengah suku bunga yang rendah dan lambannya pemulihan sektor riil mendorong investor menanamkan dananya ke negara-negara *emerging markets* yang dinilai lebih memberikan imbal hasil yang lebih tinggi disertai tingkat risiko yang membaik. Menghadapi tingginya aliran modal masuk tersebut, beberapa bank sentral di negara-negara *emerging markets* mengedepankan pengelolaan eksekutif likuiditas melalui penerapan kebijakan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM). Tingginya arus masuk modal asing secara signifikan juga menyebabkan nilai tukar mata uang mengalami penguatan yang tajam sehingga berpotensi menekan daya saing perekonomian. Dalam kondisi tersebut, beberapa negara menerapkan berbagai kebijakan guna mempertahankan nilai tukarnya. Berbagai kebijakan yang ditempuh untuk menstabilkan nilai tukar tersebut pada gilirannya justru memicu terjadinya *currency war* sehingga mempersulit proses menuju keseimbangan perekonomian global.

## 1.2

### Kinerja Perekonomian Domestik

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2010 turut diwarnai oleh dinamika perekonomian global. Membaiknya pertumbuhan ekonomi global yang mendorong naiknya volume perdagangan internasional serta memicu kenaikan harga-harga komoditas berdampak pada tingginya pertumbuhan ekspor Indonesia. Pada tahun 2010, ekspor menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kinerjanya yang meningkat tinggi mampu mempertahankan surplus transaksi berjalan, walaupun terjadi peningkatan yang tinggi baik di sisi impor maupun pembayaran *profit transfer*. Di sisi transaksi modal dan finansial, pemulihan ekonomi global yang disertai derasnya aliran modal menyebabkan surplus neraca modal yang besar dalam NPI. Perkembangan kondisi makroekonomi yang membaik ini membawa perkembangan positif bagi pasar modal Indonesia. Harga saham meningkat cukup tinggi hingga menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa terbaik di negara-negara kawasan. Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) terus mengalami penurunan yang signifikan sejak 2009. Derasnya arus modal masuk juga mengakibatkan terjadinya penguatan nilai tukar rupiah yang cukup signifikan dan peningkatan likuiditas di pasar uang jangka pendek. Kondisi ini mendorong suku bunga PUAB *over night* (O/N) bergerak di bawah BI rate dan cenderung mendekati batas bawah koridor.

Dari sisi domestik, meningkatnya keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat menjadi faktor utama cukup tingginya pertumbuhan konsumsi pada tahun 2010. Kondisi ini kemudian direspons oleh peningkatan pertumbuhan investasi seiring dengan membaiknya tendensi bisnis dan permintaan ekspor yang tinggi. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah tumbuh lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Berbagai perkembangan ini membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat

menjadi 6,1% dari 4,6% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, inflasi pada tahun 2010 meningkat cukup tinggi dengan perkembangan inflasi IHK yang mencapai 6,96%, berada di atas sasaran inflasi tahun 2010 ( $5\pm 1\%$ ). Tingginya inflasi ini bersumber dari tekanan kenaikan inflasi pada kelompok *volatile food* terkait dengan anomali cuaca yang menyebabkan terjadinya gangguan pasokan pada kelompok barang ini. Meskipun demikian, secara fundamental perkembangan inflasi pada dasarnya cukup terkendali, sejalan dengan penguatan rupiah, terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat, serta kondisi sisi penawaran yang masih memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Perkembangan ini terlihat pada inflasi inti yang tetap stabil di angka yang relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu 4,28%.

#### ■ Neraca Pembayaran

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, dinamika perekonomian dan pasar keuangan global pada tahun 2010 sangat memengaruhi kinerja eksternal perekonomian Indonesia. NPI pada tahun 2010 mengalami peningkatan surplus yang besar hingga mencapai 30,3 miliar dolar AS terkait derasnya aliran masuk modal asing dan kinerja ekspor yang membaik. Pada transaksi modal dan finansial, peningkatan surplus yang besar terkait dengan terus membaiknya kondisi fundamental domestik serta rendahnya suku bunga di negara-negara maju memicu derasnya aliran modal masuk ke Indonesia, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung. Sementara pada transaksi berjalan, walaupun menunjukkan surplus, perkembangannya menyusut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akselerasi impor yang lebih tajam dari akselerasi ekspor menyebabkan kenaikan surplus neraca perdagangan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan defisit neraca pendapatan.

Dari perkembangan tersebut posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir tahun 2010 meningkat dari posisi akhir 2009 (66,1 miliar dolar AS) menjadi 96,2 miliar dolar AS atau setara dengan 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. (Tabel 1.2)

Surplus transaksi berjalan pada tahun 2010 menyusut menjadi 6,3 miliar dolar AS dari surplus tahun sebelumnya sebesar 10,2 miliar dolar AS. Kondisi ini merupakan hasil interaksi antara kondisi eksternal dan meningkatnya permintaan domestik. Menurunnya surplus transaksi berjalan disebabkan karena kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas dan gas yang terjadi pada tahun 2010 lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan defisit neraca perdagangan minyak dan neraca pendapatan. Momentum pemulihan ekonomi dunia mampu dimanfaatkan perekonomian Indonesia dengan peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas. Namun, tingginya permintaan impor meredam potensi kenaikan surplus yang lebih tinggi lagi pada neraca perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan produksi gas juga menyumbang angka surplus pada transaksi berjalan. Sebaliknya neraca perdagangan minyak menyumbang angka defisit yang membesar terkait dengan penurunan produksi minyak dan kenaikan impor minyak yang mengiringi peningkatan permintaan domestik. Sementara itu, neraca pendapatan semakin menunjukkan peningkatan defisit terkait dengan semakin meningkatnya nilai investasi asing di dalam negeri yang berimplikasi pada peningkatan pembayaran *profit transfer* kepada investor asing.

Pada neraca perdagangan nonmigas, tingginya pertumbuhan ekspor sebagai respons dari akselerasi pemulihan ekonomi dunia dapat meningkatkan angka surplus sebesar 27,4 miliar dolar AS dari 25,5 miliar dolar AS di tahun sebelumnya. Nilai ekspor meningkat tinggi hingga 31,1% atau mencapai 129,8 miliar dolar AS, disumbang oleh peningkatan yang terjadi di seluruh sektor, baik secara volume maupun nilai. Ekspor hasil sektor pertambangan mampu menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 27,9%, sedangkan capaian pertumbuhan yang lebih rendah terjadi pada ekspor sektor pertanian (21,4%). Berdasarkan komoditasnya, komoditas berbasis sumber daya alam (SDA), seperti batubara, *Crude Palm Oil* (CPO), tembaga, karet, dan barang dari logam masih menjadi penopang utama kinerja ekspor nonmigas tahun ini. Di samping itu, komoditas non-SDA, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alat listrik dan bahan kimia juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Dilihat berdasarkan pangsaanya, ekspor nonmigas ke

China terus mengalami peningkatan, mengangkat posisi China dari posisi kelima tahun 2009 menjadi posisi ketiga sebagai negara tujuan ekspor utama Indonesia. Posisi ini menggeser AS dan Singapura. Sementara itu, pangsa tujuan ekspor Indonesia ke negara-negara di luar 10 besar juga meningkat sebagai cerminan pasar ekspor yang semakin terdiversifikasi.

Sisi impor nonmigas tercatat tumbuh lebih tinggi dibanding pada tahun 2009 sebagai respons dari tingginya permintaan domestik. Nilai impor pada tahun 2010 meningkat 42% menjadi 102,4 miliar dolar AS. Impor bahan baku masih mendominasi komposisi impor dan mengindikasikan bahwa sejauh ini peningkatan impor ialah untuk mendukung kegiatan produksi di sektor industri. Impor bahan baku dan barang konsumsi tumbuh relatif berimbang, yaitu 41,6% dan 47,4%. Terakselerasinya impor, selain karena kuatnya permintaan domestik, juga terkait dengan menguatnya nilai tukar rupiah.

Pada neraca perdagangan minyak, defisit pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya impor minyak disertai kenaikan harga minyak dunia berkontribusi besar pada meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak. Kenaikan nilai ekspor minyak relatif terbatas karena peningkatannya hanya dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak, di tengah kecenderungan penurunan volume akibat berbagai kendala produksi yang masih tetap berlanjut di sepanjang tahun 2010. Sementara itu, neraca gas masih mengalami kenaikan surplus terutama dipengaruhi oleh capaian produksi yang lebih baik disertai tingginya harga di pasar dunia.

Komponen lain transaksi berjalan yang selalu menyumbang angka defisit, yaitu neraca jasa dan pendapatan, tetap menunjukkan defisit yang besar pada tahun 2010. Peningkatan defisit yang cukup besar terjadi pada neraca pendapatan, bersumber dari membengkaknya pembayaran *profit transfer* kepada investor asing. Derasnya arus modal masuk yang terjadi pada tahun ini telah meningkatkan kewajiban Indonesia untuk memberikan imbal hasil atas penempatan dana investor asing, terutama di portofolio dan FDI.

Di sisi transaksi modal dan finansial (TMF), derasnya arus masuk modal asing juga mendorong terjadinya peningkatan surplus yang besar. Surplus TMF mencapai 26,2 miliar dolar AS, meningkat sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,0 miliar dolar AS. Peningkatan surplus ini terutama bersumber

Tabel 1.2 Neraca Pembayaran Indonesia

juta dolar AS

Uraian	2008	2009	2010*				Total
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
<b>I. TRANSAKSI BERJALAN</b>	<b>126</b>	<b>10.192</b>	<b>2.093</b>	<b>1.603</b>	<b>1.374</b>	<b>1.224</b>	<b>6.294</b>
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)	22.916	30.147	7.045	6.961	7.807	9.279	31.093
- Ekspor, fob.	139.606	119.646	35.084	37.439	39.708	45.970	158.201
- Impor, fob.	-116.690	-89.499	-28.039	-30.478	-31.901	-36.690	-127.108
1. Nonmigas, bersih	15.130	25.541	5.777	5.852	6.677	9.132	27.437
1.1. Ekspor, fob.	107.885	99.029	28.511	30.298	32.763	38.226	129.797
1.2. Impor, fob.	-92.755	-73.489	-22.734	-24.446	-26.086	-29.094	-102.360
2. Minyak, bersih	-8.362	-4.796	-1.544	-2.004	-1.856	-2.860	-8.264
2.1. Ekspor, fob.	15.387	10.790	3.551	3.835	3.744	4.305	15.436
2.2. Impor, fob.	-23.749	-15.586	-5.095	-5.839	-5.600	-7.166	-23.700
3. Gas, bersih	16.147	9.402	2.812	3.113	2.987	3.008	11.920
3.1. Ekspor, fob.	16.333	9.826	3.022	3.306	3.201	3.438	12.968
3.2. Impor, fob.	-186	-424	-210	-193	-215	-430	-1.048
B. Jasa-jasa, bersih	-12.998	-9.675	-2.129	-2.307	-2.286	-2.770	-9.491
C. Pendapatan, bersih	-15.155	-15.140	-3.993	-4.262	-5.385	-6.619	-20.258
D. Transfer berjalan, bersih	5.364	4.861	1.169	1.210	1.238	1.334	4.950
<b>II. TRANSAKSI MODAL &amp; FINANSIAL</b>	<b>-1.832</b>	<b>5.002</b>	<b>5.013</b>	<b>4.661</b>	<b>6.669</b>	<b>9.874</b>	<b>26.218</b>
A. TRANSAKSI MODAL	294	96	18	0	0	14	32
B. TRANSAKSI FINANSIAL	-2.126	4.906	4.995	4.661	6.669	9.861	26.186
1. Investasi Langsung	3.419	2.628	2.484	2.298	1.615	3.439	9.836
2. Investasi Portofolio	1.764	10.336	6.159	1.089	5.994	1.964	15.205
3. Investasi Lainnya	-7.309	-8.058	-3.648	1.274	-939	4.458	1.145
<b>III. JUMLAH (I+II)</b>	<b>-1.706</b>	<b>15.194</b>	<b>7.106</b>	<b>6.264</b>	<b>8.044</b>	<b>11.098</b>	<b>32.512</b>
<b>IV. SELISIH PERHITUNGAN BERSIH</b>	<b>-238</b>	<b>-2.688</b>	<b>-485</b>	<b>-843</b>	<b>-1.089</b>	<b>191</b>	<b>-2.227</b>
<b>V. NERACA KESELURUHAN (III+IV)</b>	<b>-1.945</b>	<b>12.506</b>	<b>6.621</b>	<b>5.421</b>	<b>6.955</b>	<b>11.289</b>	<b>30.285</b>
<b>VI. CADANGAN DEvisa DAN YANG TERKAIT (A+B)<sup>1)</sup></b>	<b>1.945</b>	<b>-12.506</b>	<b>-6.621</b>	<b>-5.421</b>	<b>-6.955</b>	<b>-11.289</b>	<b>-30.285</b>
Memorandum:							
- Posisi Cadangan Devisa <sup>2)</sup>	51.639	66.105	71.823	76.321	86.551	96.207	96.207
(dlm bulan impor dan pembayaran utang LN pemerintah)	4,0	6,4	5,3	5,6	6,3	7,0	7,0

1) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

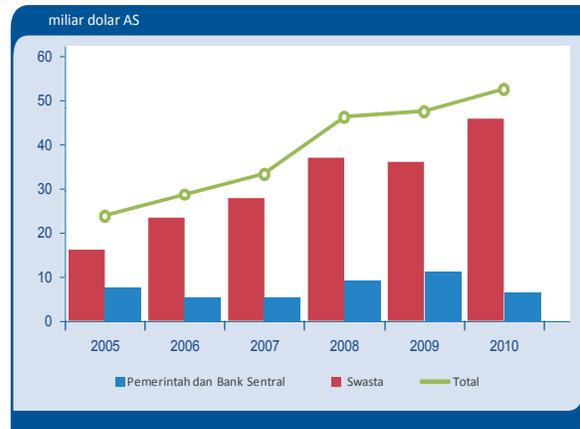
2) Sejak 1998, posisi cadangan devisa berdasarkan konsep aktiva luar negeri bruto menggantikan konsep cadangan devisa resmi. Sejak 2000, posisi cadangan memakai konsep International Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL).

\* Angka-angka sementara

dari investasi langsung yang meningkat sangat tajam pada tahun ini (Grafik1.8). Membaiknya iklim investasi dan kinerja ekonomi domestik telah meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia. Perkembangan investasi asing langsung tahun 2010 juga ditunjukkan oleh meningkatnya pangsa sektor nonmigas. Di sektor ini investasi asing langsung terbesar ditanamkan pada industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan dan komunikasi.

Sementara itu, investasi portofolio pada tahun 2010 juga meningkat tajam dibanding 2009, seiring dengan berlanjutnya pelonggaran moneter negara-negara maju dan imbal hasil yang lebih atraktif di Indonesia. Walaupun mengalami peningkatan secara keseluruhan tahun, arus masuk portofolio cenderung berfluktuasi, bahkan sempat mengalami penurunan yang cukup tajam pada triwulan II sebagai dampak dari terjadinya krisis Yunani. Pada triwulan IV, arus masuk portofolio juga kembali mengalami tekanan dipicu oleh terjadinya krisis Irlandia, ketegangan di Semenanjung Korea, dan pengetatan moneter di China. Peningkatan investasi portofolio yang besar pada tahun ini terutama pada penempatan di SBN Rupiah dan saham, sementara penempatan pada SBI dan obligasi global RI mengalami penurunan.

Komponen investasi lainnya yang terdiri dari utang swasta dan pemerintah mengalami surplus 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2010, setelah pada tahun sebelumnya mengalami defisit 8,1 miliar dolar AS. Namun, surplus ini lebih disebabkan oleh terjadinya penurunan pembayaran utang pemerintah dibandingkan dengan penarikan utang baru. Peningkatan ini lebih rendah dari perkiraan semula terkait dengan rendahnya realisasi APBN 2010 sehingga



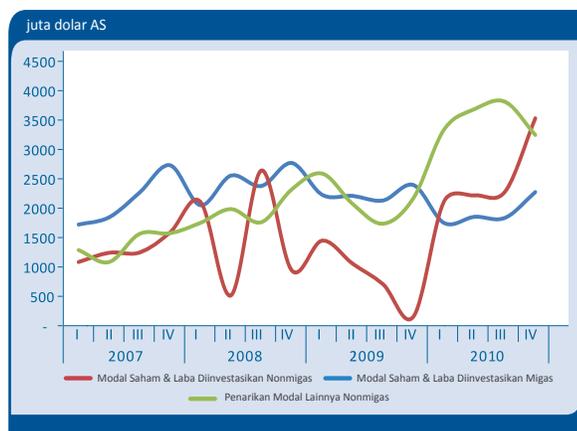
Grafik 1.9 Penarikan Utang

mengakibatkan angka penarikan utang pemerintah yang lebih kecil. Sementara itu, utang swasta mengalami penurunan sebagai cerminan dari membaiknya kondisi keuangan sektor swasta. Hal ini terkait juga dengan pembayaran utang korporasi yang meningkat sangat tinggi, melampaui kenaikan penarikan utang baru. (Grafik 1.9)

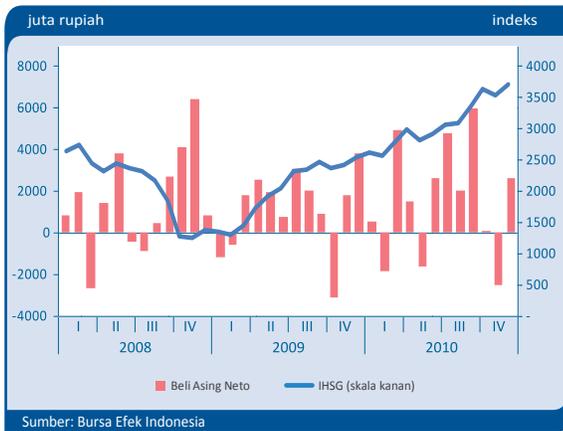
## ■ Pasar Keuangan

Dinamika sistem keuangan global pada tahun 2010 sangat berpengaruh terhadap kinerja pasar keuangan Indonesia. Derasnya arus masuk modal asing ke Indonesia, di samping akibat adanya kesenjangan kebijakan antara negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*, juga didukung oleh kuatnya fundamental ekonomi domestik dan meningkatnya peringkat investasi Indonesia yang semakin mengarah pada peringkat layak investasi (*investment grade*). Kondisi ini berdampak positif terhadap kinerja pasar keuangan Indonesia. Pasar modal Indonesia mengalami perbaikan dengan adanya peningkatan harga saham yang cukup tinggi serta penurunan imbal hasil SBN. Kinerja pasar saham sejak awal tahun terus berada dalam tren yang meningkat didukung oleh prospek keuangan emiten yang relatif lebih baik dibanding negara kawasan. Sementara itu, imbal hasil SBN sejak awal tahun turun 212 bps sejalan dengan imbal hasil SBN yang relatif lebih menarik dibanding negara-negara kawasan. Di pasar uang jangka pendek, derasnya arus modal masuk mengakibatkan tingginya likuiditas pasar uang rupiah dan mendorong turunnya suku bunga PUAB.

Di pasar saham, perkembangan beberapa indikator penting dari sisi makroekonomi seperti nilai tukar yang relatif stabil, prospek pertumbuhan ekonomi, inflasi yang



Grafik 1.8 Komposisi FDI

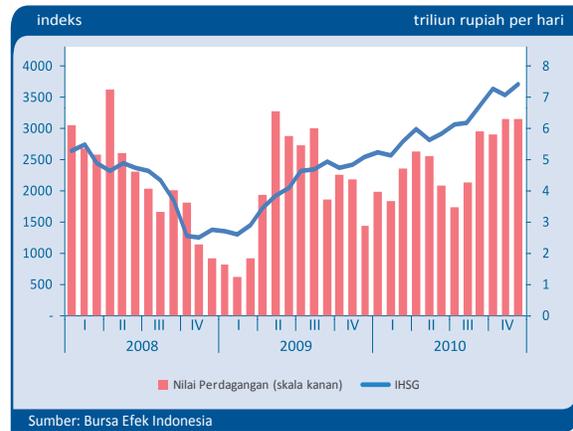


Grafik 1.10 IHS dan Beli Asing Neto

moderat, suku bunga yang relatif murah serta ekspektasi pencapaian peringkat layak investasi dalam waktu dekat, semakin menambah kepercayaan investor asing untuk menempatkan dananya di pasar saham (Grafik 1.10). Kondisi ini semakin diperkuat lagi dengan derasnya arus modal masuk sehingga meningkatkan aktivitas dan likuiditas pasar saham pada tahun 2010. Beli asing neto tercatat meningkat menjadi Rp 18,4 triliun dari Rp 13,9 triliun di tahun sebelumnya dan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan saham tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4,8 triliun per hari dari Rp 3,9 triliun per hari di tahun sebelumnya (Grafik 1.11). Akibatnya, IHSG meningkat tinggi sepanjang tahun 2010 dan menjadikan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bursa terbaik di antara negara-negara kawasan, dengan peningkatan sebesar 46,1% (yoy). Berangkat dari level 2.534,4 pada Desember 2009, IHSG terus menunjukkan tren penguatan hingga menembus level 3.703,5 pada akhir Desember 2010.

Dalam perjalanannya, perkembangan IHSG sempat beberapa kali mengalami tekanan. Beberapa penurunan indeks yang cukup signifikan di antaranya berkaitan dengan sentimen krisis Yunani pada triwulan II 2010 serta isu eksternal lainnya, seperti pengetatan moneter di China, krisis Irlandia serta konflik Korea yang meningkat di akhir tahun. Meskipun demikian, tren penguatan IHSG ini tetap perlu diwaspadai karena peningkatan harga yang terindikasi cenderung lebih tinggi dari perkembangan fundamentalnya ini berpotensi menimbulkan penggelembungan harga aset (*asset price bubble*).

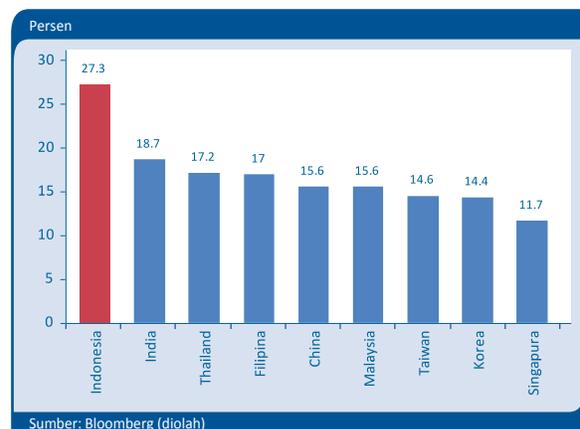
Pencapaian IHSG selama tahun 2010 didukung pula oleh kondisi mikro emiten yang memiliki prospek keuangan yang relatif baik di antara negara kawasan (Grafik 1.12). Berbagai rilis laporan keuangan emiten pada triwulan



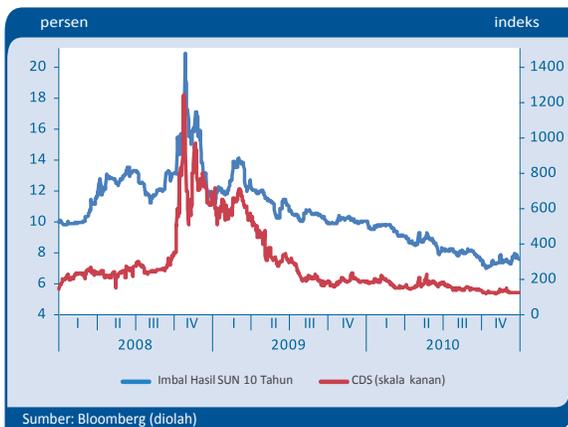
Grafik 1.11 IHS dan Perdagangan

III 2010 menunjukkan tingkat keuntungan emiten yang masih cukup terjaga. Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara kawasan, *return on equity* emiten Indonesia tercatat masih yang terbesar. Cukup kondusifnya kondisi mikro emiten juga digambarkan oleh aksi pembagian dividen oleh beberapa emiten. Pembagian dividen tersebut merupakan sinyal bahwa kondisi solvabilitas emiten masih cukup kokoh. Pelaku pasar juga cukup optimis terhadap pertumbuhan laba emiten ke depan mengingat ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pihak korporasi dalam pengalokasian anggaran untuk pengeluaran modal.

Sementara itu, membaiknya pasar obligasi ditandai oleh adanya tren penurunan imbal hasil SBN pada tahun 2010. Hal ini didorong oleh sinyal penerapan kebijakan moneter negara maju yang cenderung longgar, imbal hasil yang tinggi di dalam negeri, dan membaiknya persepsi risiko sejalan dengan kondisi makroekonomi. Perbaikan



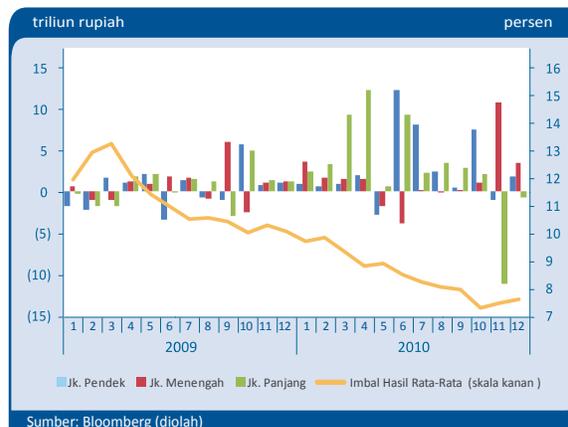
Grafik 1.12 Perbandingan ROE Regional



**Grafik 1.13** Imbal Hasil SBN dan CDS

ini tercermin dari angka *Credit Default Swap* (CDS) yang terus membaik sejak periode awal 2009 (Grafik 1.13). Di samping itu, kinerja SBN juga ditopang oleh terjaganya kesinambungan fiskal disertai terbatasnya risiko fiskal. Dengan perkembangan tersebut, posisi asing di SBN naik sebesar Rp 82,2 triliun pada tahun 2010, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat net beli sebesar Rp 20,3 triliun (Grafik 1.14). Rendahnya net beli tahun lalu terkait dengan rendahnya volume perdagangan (Rp 3,4 triliun per hari) akibat belum pulihnya kepercayaan pasar pascakrisis 2008 sehingga mendorong pelaku pasar cenderung melakukan aksi *buy and hold*. Seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi, aktivitas perdagangan kembali meningkat dan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 4,7 triliun per hari (Grafik 1.15).

Kombinasi berbagai faktor positif baik dari sisi domestik maupun eksternal pada akhirnya mendorong minat



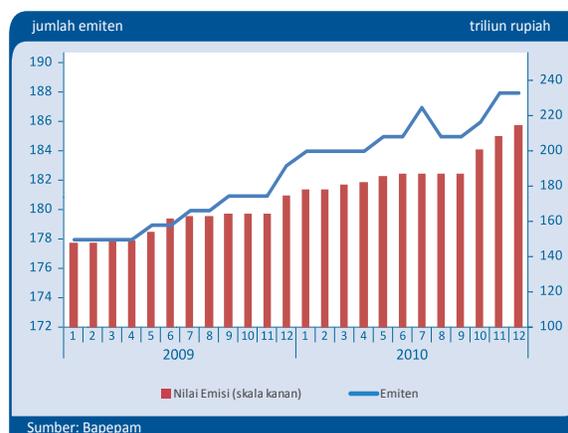
**Grafik 1.14** Imbal Hasil SBN dan Aktivitas Asing

asing di SBN dan menekan imbal hasil untuk terus turun. Imbal hasil SBN jangka pendek, menengah dan panjang masing-masing turun sebesar 207bps, 232bps dan 181bps, sehingga secara umum imbal hasil turun 212bps dan ditutup pada level 7,16%. Secara umum, imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,5% merupakan imbal hasil yang lebih atraktif dibandingkan dengan negara kawasan, seperti Thailand, Malaysia dan Filipina yang masing-masing mencapai sebesar 3,6%, 3,8% dan 6,0%.

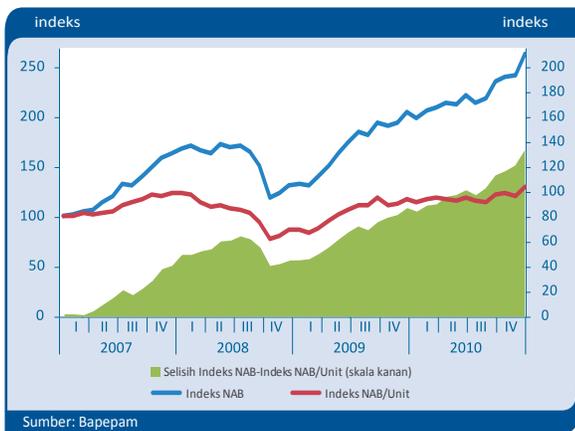
Kinerja SBN yang membaik tersebut berpengaruh positif terhadap penerbitan obligasi korporasi di pasar modal domestik. Penurunan imbal hasil SBN, yang seringkali dijadikan tolok ukur dalam penerbitan obligasi, mendorong perusahaan melakukan penerbitan obligasi untuk membiayai kegiatan usahanya. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya nilai emisi obligasi korporasi sebesar 22,7% dibanding dengan tahun sebelumnya. Nilai emisi meningkat sebesar Rp 40 triliun, menjadi Rp



**Grafik 1.15** Imbal Hasil SBN dan Volume Perdagangan



**Grafik 1.16** Jumlah Emisi dan Emiten Obligasi Korporasi



Grafik 1.17 NAB dan NAB/Unit Reksadana

215,13 triliun, dengan penambahan emiten sebanyak 6 perusahaan menjadi 189 perusahaan (Grafik 1.16). Sebagian besar penerbitan obligasi korporasi (Rp 28,1 triliun), khususnya oleh emiten perusahaan pembiayaan, dilakukan dalam rangka *refinancing*. Sektor lainnya yang juga turut meningkat adalah di bidang infrastruktur, *utility* dan transportasi, serta pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, di pasar reksadana, kinerja positif *underlying asset* yang terus meningkat, mendorong NAB reksadana naik pesat pada tahun 2010. Kondisi ini didukung pula oleh penurunan suku bunga deposito yang menjadikan reksadana sebagai alternatif investasi yang cukup menjanjikan, khususnya bagi kalangan pemodal ritel. Dari sisi *underlying asset*, peningkatan kinerja reksadana sejalan dengan kenaikan harga aset keuangan seperti saham, SBN, dan obligasi korporasi. Perkembangan ini mendorong NAB reksadana naik sebesar 22,7%<sup>2</sup>

2 Tanpa memperhitungkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas

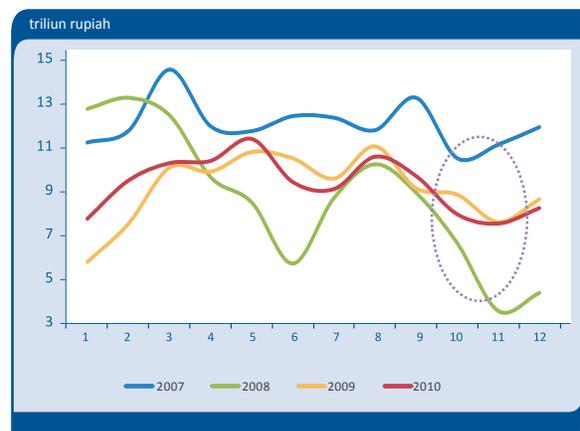
Namun, dengan NAB per unit hanya naik sebesar 9,9%, peningkatan NAB reksadana tahun ini pada dasarnya lebih banyak bersumber dari naiknya unit penyertaan dibandingkan dengan kenaikan nilai aset (NAB per produk) yang dikelola (Grafik 1.17).

Berdasarkan produknya, hasil kinerja manajer investasi sangat bervariasi dalam pengelolaan dananya, seperti terlihat pada NAB tiap produk reksadana. Pertumbuhan NAB pada produk reksadana berbasis saham seperti reksadana saham (22,6%), reksadana indeks (-39%), reksadana campuran (13,3%) dan reksadana *Exchange Trade Funds* (ETF) Saham (-29,3%), kinerjanya masih jauh berada di bawah tolak ukur (IHSG) yang tumbuh sebesar 46,1%. Sementara pertumbuhan NAB untuk produk reksadana berbasis surat utang, seperti pendapatan tetap (31,4%), pasar uang (41,5%) dan terproteksi (21,7%), kinerjanya melampaui tolak ukur kenaikan harga IDMA *Bond Index* yang tumbuh sebesar 12,2%.

Di pasar keuangan jangka pendek, perkembangan pasar uang ditandai dengan suku bunga PUAB O/N yang terus bergerak di bawah BI Rate dan bahkan menurun mendekati batas bawah koridor, sebagai dampak dari melimpahnya likuiditas jangka pendek perbankan. Kondisi ini terkait dengan permintaan di pasar uang yang masih cenderung rendah, sementara pada saat yang bersamaan terdapat pasokan likuiditas yang besar sebagai akibat derasnya aliran modal masuk. Selama tahun 2010, suku bunga PUAB O/N berada di bawah BI Rate dengan rata-rata setahun sebesar 6,08%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya sebesar 7,11% (Grafik 1.18). Kondisi belum optimalnya pembentukan permintaan (*demand creation*) di PUAB



Grafik 1.18 Suku Bunga PUAB O/N



Grafik 1.19 Volume PUAB

terindikasi dari perkembangan volume transaksi PUAB yang masih relatif rendah. Selama tahun 2010, rata-rata harian volume PUAB total mencapai Rp 9,4 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan volume tahun 2009 (Rp 9,1 triliun) dan masih di bawah volume sebelum krisis sebesar Rp 12,5 triliun (Grafik 1.19). Sementara itu, dari sisi pasokan, peningkatan likuiditas pasar uang pada tahun 2010 terutama berasal dari derasnya arus modal asing masuk yang ditempatkan baik di saham, SBN maupun Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dari dalam negeri, walaupun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, pasokan likuiditas yang besar berasal dari ekspansi rekening Pemerintah yang meningkat besar di akhir tahun. Menghadapi kondisi ini Bank Indonesia berupaya melakukan pengelolaan likuiditas melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) di sepanjang tahun dan menerapkan peningkatan GWM menjelang akhir tahun 2010, sehingga potensi eksesi likuiditas yang lebih besar dapat diredam.

## ■ Nilai Tukar

Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terutama disebabkan oleh derasnya aliran masuk modal asing. Pergerakan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan interaksi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik serta fundamental perekonomian domestik yang kuat. Nilai tukar rupiah mulai mengalami apresiasi sejak awal tahun dan mencapai level Rp 9.081 per dolar AS atau menguat secara rata-rata sebesar 3,8% dibandingkan dengan akhir tahun 2009. Secara *point-to-point* rupiah terapresiasi sebesar 4,4%. (Grafik 1.20). Apresiasi yang terjadi secara gradual tersebut disertai tingkat volatilitas sebesar 0,4%, lebih rendah dibandingkan volatilitas yang terjadi pada 2009 yaitu 0,9% (Grafik 1.21)

Di awal tahun 2010 pergerakan Rupiah sempat mengalami gejolak, sebagai dampak dari krisis fiskal di Yunani yang sempat menimbulkan sentimen *risk aversion* aset negara-negara *emerging markets*. Namun, optimisme pemulihan global, komitmen penyelamatan (*bailout*) EC-IMF terhadap Yunani, serta peningkatan peringkat utang Indonesia mampu menutupi sentimen negatif terkait Yunani tersebut, sehingga rupiah kemudian mengalami penguatan yang cukup tajam dari level Rp 9.400 per dolar AS di awal Februari 2010 ke level di bawah Rp 9.000 per dolar AS memasuki Mei 2010. Di awal Juni 2010, krisis fiskal di Yunani akhirnya meluas ke krisis PIIGS dan sempat menimbulkan guncangan luar biasa di pasar keuangan global. Perilaku *risk aversion* yang memuncak di triwulan ini mendorong nilai tukar kembali ke level Rp 9.400 per dolar AS. Namun, seiring dengan meredanya kekhawatiran pelaku pasar, yang ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi dunia, semakin lebarnya selisih suku bunga antara negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*, serta perbaikan kondisi prospek Indonesia, rupiah kembali bergerak stabil dengan kecenderungan menguat di akhir triwulan II 2010

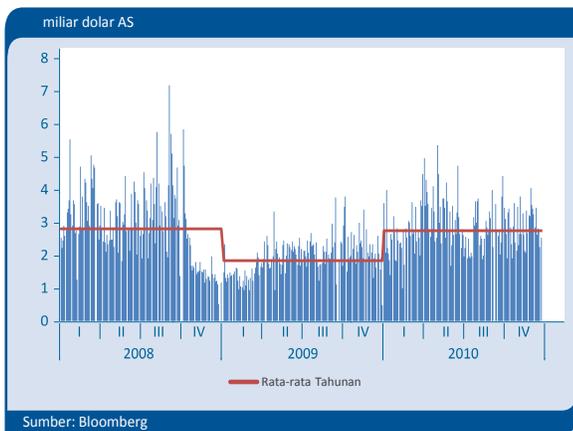
Selanjutnya nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan penguatan di paruh kedua 2010. Apresiasi nilai tukar rupiah tersebut terjadi sejalan dengan berlanjutnya aliran dana ke kawasan Asia di tengah melimpahnya likuiditas global serta perbedaan respons kebijakan antara negara-negara maju dan negara-negara *emerging markets*. Meski diwarnai dengan berbagai koreksi, penguatan nilai tukar rupiah juga tidak terlepas dari prospek dolar AS yang sedang mengalami tekanan depresiasi. Dari sisi domestik, solidnya fundamental ekonomi dan prospek pencapaian *Investment Grade*



Grafik 1.20 Rata-rata Nilai Tukar Rupiah



Grafik 1.21 Volatilitas Nilai Tukar Rupiah



Grafik 1.22 Volume Transaksi Harian Pasar Valuta Asing

Indonesia yang membaik menjadi faktor penarik bagi aliran modal masuk.

Aliran modal kembali gencar membanjiri pasar negara-negara *emerging markets* yang kali ini dipicu oleh kuatnya ekspektasi terhadap rendahnya suku bunga kebijakan negara maju dan peluncuran *quantitative easing* tahap dua oleh Federal Reserve. Perkembangan yang diutarakan terakhir tersebut mendorong sentimen depresiasi dolar AS sehingga semakin memicu derasnya aliran modal ke imbal hasil aset dengan imbal hasil lebih tinggi di negara-negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas pelaku domestik di pasar valuta asing juga menunjukkan peningkatan. Meski belum mencapai level sebelum krisis, pembelian valuta asing korporasi menunjukkan tren meningkat selama tahun 2010, sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Di sisi lain, korporasi domestik tetap konsisten memasok valuta asing yang diantaranya bersumber dari hasil penjualan ekspor. Sejak awal tahun 2010, pasokan valuta asing yang bersumber dari penjualan valuta asing korporasi domestik meningkat. Hal ini sejalan dengan kinerja ekspor Indonesia yang juga terus menunjukkan perbaikan. Lima besar korporasi penjual valuta asing selama tahun 2010 didominasi oleh perusahaan eksportir hasil perkebunan/agrikultur. Kombinasi aktivitas asing-domestik tersebut mendorong peningkatan rata-rata harian volume transaksi di pasar valuta asing yang semakin mendekati nilai sebelum krisis (3 miliar dolar AS per hari). Kondisi ini mengindikasikan pasar valuta asing yang mulai berangsur normal, pasca hantaman krisis. (Grafik 1.22)

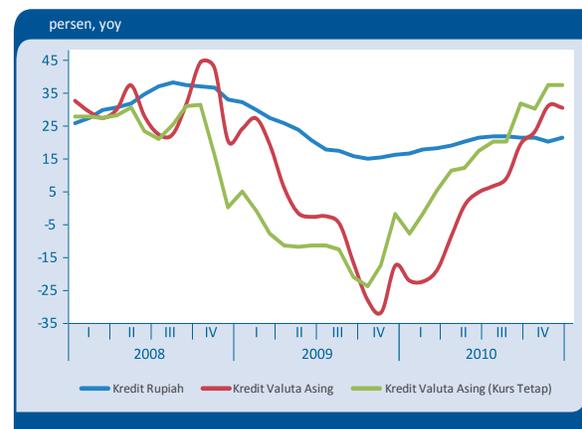
Derasnya arus masuk modal asing dan besarnya tekanan apresiasi rupiah menimbulkan kompleksitas kebijakan makroekonomi. Di satu sisi apresiasi rupiah membantu

dalam pengendalian inflasi, akan tetapi di sisi lain dapat berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin cepat terjadinya defisit transaksi berjalan. Terlebih lagi, sejalan dengan sifatnya yang berjangka pendek, aliran modal portofolio sangat rentan terhadap perubahan persepsi global. Bila saat ini sentimen eksternal yang terbentuk lebih mendukung penguatan nilai tukar, ke depan, sentimen tersebut dapat berubah bilamana terdapat guncangan di perekonomian global. Hal ini dapat memicu perilaku *risk aversion* yang pada akhirnya menimbulkan gejolak nilai tukar.

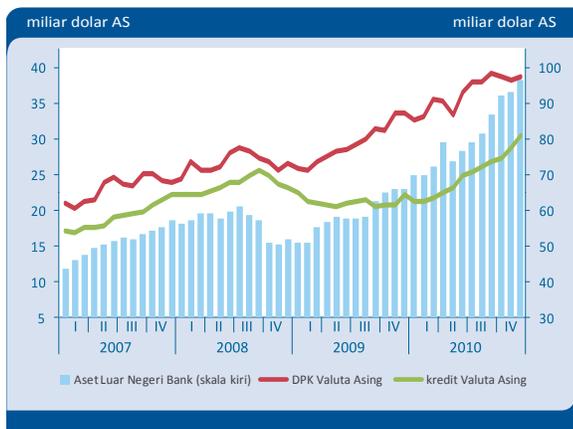
## Perbankan

Sebagai bagian utama dalam sistem keuangan, kinerja perbankan Indonesia juga terpengaruh oleh derasnya aliran masuk modal dari luar negeri. Hal ini ditandai oleh meningkatnya eksekusi likuiditas perbankan di tengah kinerjanya yang mengalami perbaikan. Merespons derasnya aliran dana, kredit dalam bentuk valuta asing meningkat sangat tinggi pada tahun 2010. Namun dengan aliran modal yang sebagian besar bersifat jangka pendek, perbankan Indonesia cenderung merespons dengan menempatkan aset pada giro dan *interbank call money* pada bank di luar negeri. Walaupun demikian, secara umum kinerja industri perbankan semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah. Selain itu, intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 22,8%.

Terus meningkatnya likuiditas valuta asing bank, terkait dengan tingginya peningkatan aset luar negeri dan dana pihak ketiga (DPK) valuta asing perbankan, kurang diikuti



Grafik 1.23 Pertumbuhan Kredit per Valuta Asing



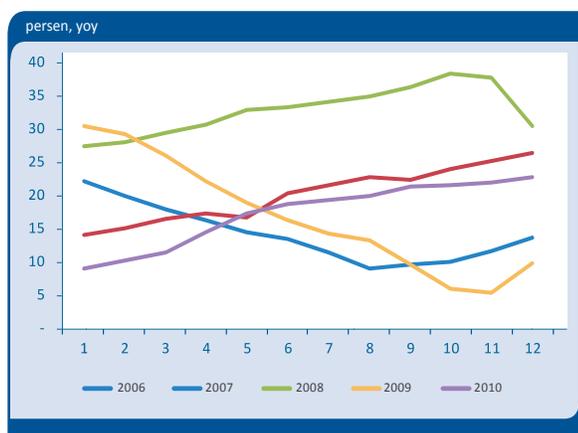
Grafik 1.24 NFA Bank, Kredit Valuta Asing dan DPK Valuta Asing

oleh peningkatan kredit valuta asing secara proporsional. Walaupun selama tahun 2010 kredit valuta asing tercatat tumbuh cukup akseleratif, yaitu mencapai 30,7%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya -17,4%, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan *foreign asset* bank dan DPK valuta asing, akselerasi pertumbuhan kredit valuta asing tersebut masih relatif terbatas. (Grafik 1.23 dan 1.24). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya pertumbuhan aliran masuk modal asing masih sangat sedikit yang tersalurkan ke sektor riil (dalam bentuk penyaluran kredit oleh perbankan). Selain itu, besarnya selisih antara pertambahan aset luar negeri bank dan DPK valuta asing terhadap kredit valuta asing, mencerminkan besarnya likuiditas valuta asing bank yang belum ditempatkan di pasar domestik.

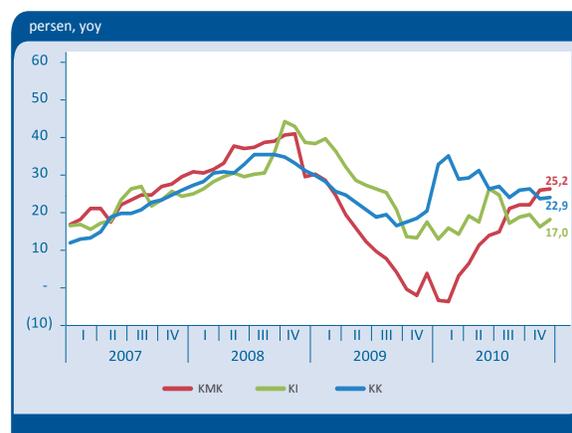
Sementara itu, secara umum peran intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan pada tahun 2010 disertai dengan capaian kinerja usaha yang meningkat.

Pertumbuhan kredit yang tinggi lebih terarah ke penggunaan yang produktif dan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi yang strategis. Perannya sebagai lembaga intermediasi juga membaik dengan pertumbuhan kredit yang lebih akseleratif dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, kinerja industri perbankan mengarah ke perkembangan yang lebih baik dengan menurunnya beberapa nilai risiko yang dihadapi baik dalam pemberian kredit maupun dalam menghadapi kondisi pasar keuangan. Risiko kredit menurun seiring dengan nilai NPL yang cenderung menurun, sementara tekanan risiko pasar semakin menurun seiring dengan stabilnya tingkat suku bunga dan nilai tukar.

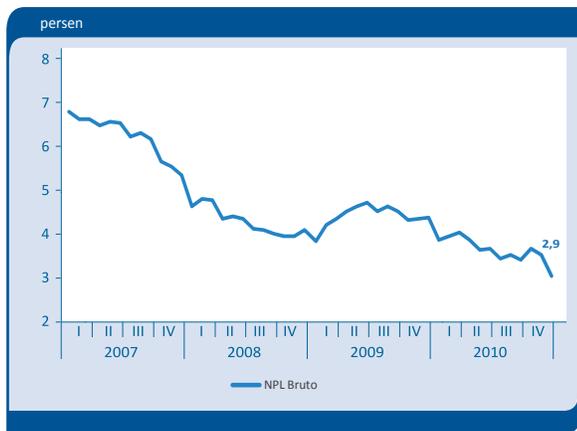
Pada tahun 2010, pertumbuhan kredit meningkat tinggi mencapai 22,8% seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi (Grafik 1.25). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja yang meningkat cukup pesat menopang laju pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan dan menggeser peran kredit konsumsi. Kondisi ini mengindikasikan penyerapan kredit perbankan yang lebih dapat dimanfaatkan untuk penggunaan yang bersifat produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan kredit modal kerja tercatat meningkat 25,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,7%. Sementara itu, pertumbuhan kredit investasi juga mengalami akselerasi yang cukup tinggi, yaitu mencapai 17,0%. Sebaliknya, pertumbuhan kredit konsumsi yang tinggi di awal tahun 2010 justru berada dalam tren menurun sejak Mei 2010 meski dengan tingkat pertumbuhan yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 22,9% (Grafik 1.26). Peningkatan kredit di tahun 2010 juga disertai dengan NPL yang menurun. Hingga akhir tahun 2010 NPL (bruto) terus menurun menjadi 2,9% dari 3,8% di akhir tahun sebelumnya (Grafik 1.27).



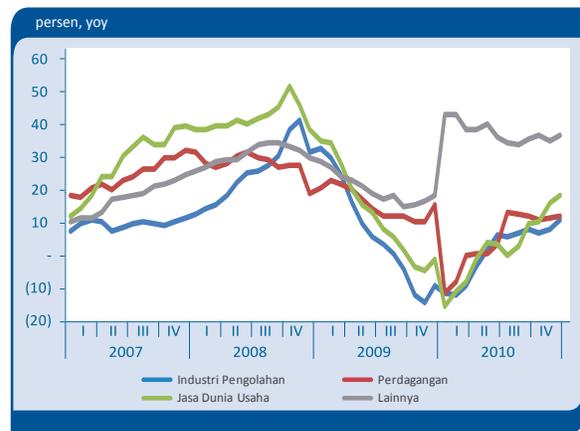
Grafik 1.25 Pertumbuhan Kredit



Grafik 1.26 Pertumbuhan Kredit Penggunaan



**Grafik 1.27 Perkembangan NPL**



**Grafik 1.28 Kredit Sektoral**

Dilihat dari penyaluran kredit secara sektoral, pertumbuhan kredit selama tahun 2010 ditopang oleh sektor lainnya<sup>3</sup>, namun pertumbuhan kredit sektor yang memberikan sumbangan utama terhadap PDB semakin akseleratif (Grafik 1.28). Kontribusi sektor lainnya dengan pertumbuhan sebesar 37,2% dan pangsa sebesar 34,4% dari total kredit, masih menjadi penopang pertumbuhan kredit total namun telah menunjukkan tren melambat sejak Mei 2010 sejalan dengan perkembangan kredit konsumsi. Meskipun demikian, sektor strategis lainnya khususnya sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa dunia usaha dan jasa sosial tumbuh akseleratif dengan kontribusi terhadap total kredit yang meningkat sejak akhir triwulan I 2010.

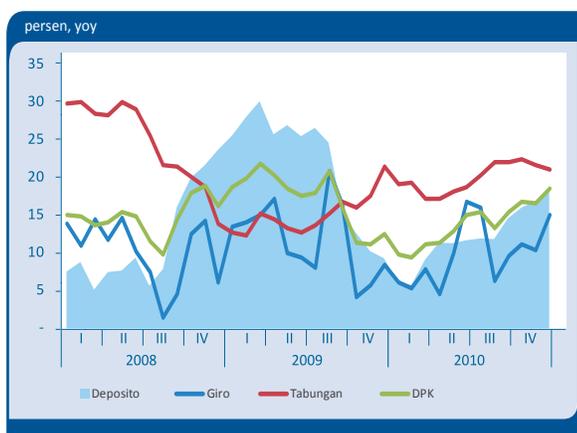
Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK pada tahun 2010 meningkat sebesar 18,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12,5% (Grafik 1.29). Pertumbuhan DPK ini terutama didukung oleh pertumbuhan uang kuasi. Pertumbuhan DPK ditopang oleh pertumbuhan tabungan dan deposito. Pertumbuhan deposito meningkat menjadi 18,6% dari akhir tahun sebelumnya 9,34%, sementara itu, pertumbuhan tabungan relatif stabil yaitu sebesar 21,1% dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya 21,4%. Pertumbuhan giro selama tahun 2010 sebesar 15,0%, dengan tren yang meningkat dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya 8,35%.

3 Mencakup kredit perumahan, kendaraan, dan alat-alat rumah tangga. Pertumbuhan kredit lain-lain tsb mencerminkan dominannya peranan kredit konsumsi

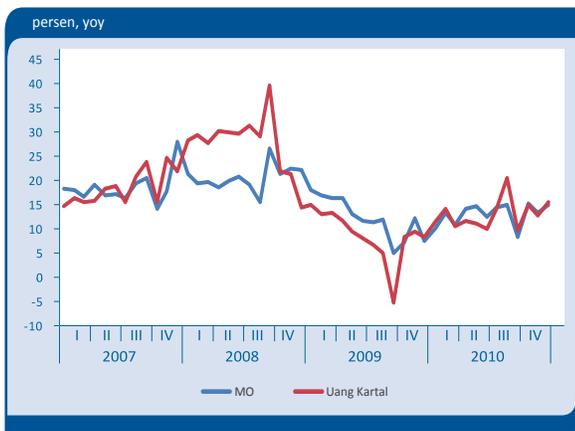
## ■ Likuiditas Perekonomian dan Sistem Pembayaran

Membaiknya aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat mendorong naiknya pertumbuhan uang kartal dan uang primer pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan uang kartal mencapai 12,7% pada tahun 2010, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode tahun 2009 yang sebesar 8,3%. Pada akhir 2010, uang kartal secara tahunan meningkat 15,2%. Sementara itu, uang primer (M0) tumbuh rata-rata sebesar 12,8% dan di penghujung tahun tercatat tumbuh sebesar 14,7% (Grafik 1.30). Kenaikan pertumbuhan uang primer yang cukup tinggi di akhir tahun dipengaruhi oleh penerapan kebijakan kenaikan GWM Primer sejak November 2010.

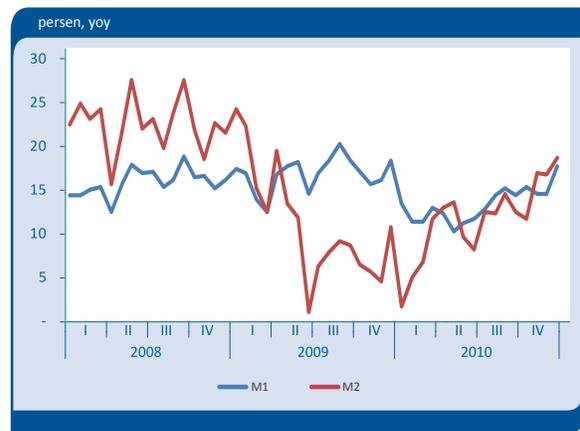
Likuiditas perekonomian mengalami peningkatan pada tahun 2010 (Grafik 1.31), meskipun M1 belum kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum 2009. Pertumbuhan M1 rata-rata sebesar 12,9%, dan di penghujung tahun 2010 tercatat tumbuh 17,8%. Namun, secara riil akselerasi pertumbuhan M1 ini belum mengalami perubahan yang



**Grafik 1.29 Perkembangan DPK**



**Grafik 1.30** Pertumbuhan Uang Primer & Kartal



**Grafik 1.31** Likuiditas Perekonomian

berarti dan masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada periode Mei 2006 - Desember 2008 yang mencapai 21,5%. (Grafik 1.32)

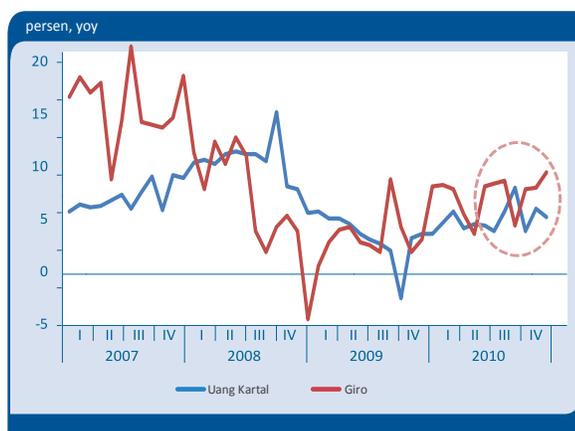
Sementara itu, meningkatnya M2 terutama dipengaruhi oleh bertambahnya uang kuasi seiring dengan derasnya aliran uang masuk dari luar negeri. Berdasarkan faktornya, pertumbuhan M2 pada tahun 2010 didukung oleh tingginya kenaikan Aktiva Luar Negeri Bersih yang sebagian besar ditempatkan sebagai uang kuasi di perbankan. Di samping itu, perkembangan Aktiva Dalam Negeri Bersih pada tahun 2010 yang juga meningkat terutama bersumber dari pertumbuhan kredit yang akseleratif sehingga turut berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan M2 (Grafik 1.33)

Sementara itu, meningkatnya aktivitas perekonomian juga tercermin pada meningkatnya transaksi di sistem pembayaran. Selama tahun 2010, total nilai transaksi

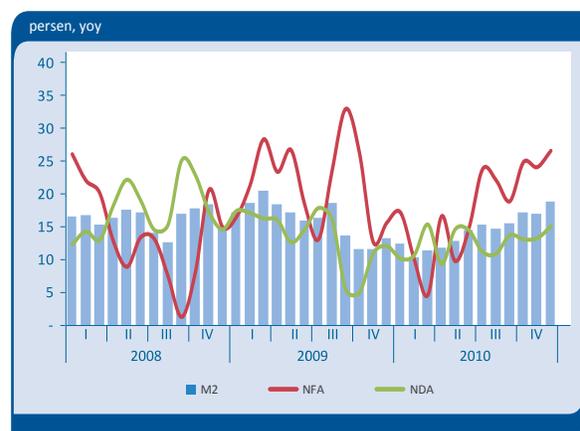
elektronik melalui sistem BI RTGS (*Real Time Gross Settlement*) meningkat hingga mencapai 26,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rata-rata perputaran per hari sebesar Rp 220,2 triliun. Demikian halnya dengan nilai transaksi keuangan yang dilakukan melalui sarana Sistem Kliring Nasional (SKN) yang meningkat hingga 11,8%, dengan rata-rata harian perputaran transaksi mencapai Rp 7,1 triliun. Sementara itu, menguatnya permintaan juga berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pengguna alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik yang juga naik hingga 11,1% pada tahun 2010.

## ■ Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2010 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB 2010 mencapai 6,1%, meningkat dari



**Grafik 1.32.** Kontribusi Pertumbuhan M1



**Grafik 1.33.** Perkembangan M2, NFA dan NDA

Tabel 1.3 Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan

persen

Komponen	2007	2008	2009*				2009	2010**				2010
			I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi	4,9	5,9	7,2	6,2	5,4	6,1	6,2	2,7	3,4	5,1	4,9	4,0
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,3	6,0	4,8	4,7	4,0	4,9	3,9	5,0	5,2	4,4	4,6
Konsumsi Pemerintah	3,9	10,4	18,8	16,3	9,8	18,0	15,7	-7,6	-7,3	4,8	7,3	0,3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,3	11,9	3,5	2,3	3,2	4,1	3,3	8,0	8,0	9,2	8,7	8,5
Investasi NonBangunan	11,9	25,4	-4,4	-7,8	-8,2	-6,4	-6,7	10,2	10,6	16,6	14,7	13,1
Investasi Bangunan	8,5	7,5	6,3	6,1	7,7	8,1	7,1	7,3	7,2	6,8	6,7	7,0
Ekspor Neto	6,5	7,6	5,3	9,4	25,2	10,9	12,5	12,1	2,0	1,4	13,7	7,5
Ekspor Barang dan Jasa	8,5	9,5	-18,7	-15,5	-7,8	3,7	-9,7	20,0	14,6	9,6	16,1	14,9
Impor Barang dan Jasa	9,1	10,0	-24,4	-21,0	-14,7	1,6	-15,0	22,6	18,4	12,2	16,9	17,3
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>

Sumber: BPS

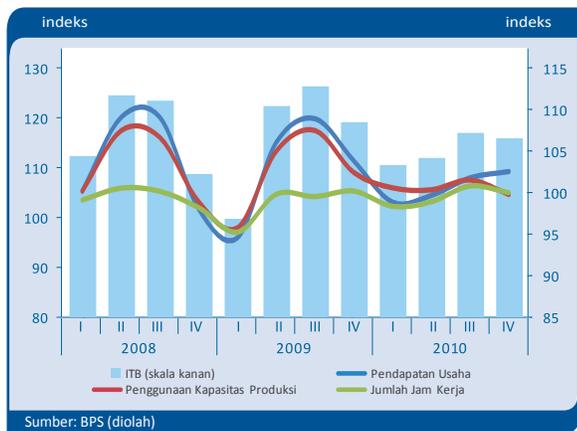
\* angka sementara \*\*angka sangat sementara

4,6% pada tahun 2009. Di sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja ekspor dan investasi yang tumbuh tinggi, disertai konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Kenaikan harga komoditas internasional turut menunjang tingginya pertumbuhan ekspor nasional. Selain itu, meningkatnya kinerja ekspor juga diikuti oleh lebih terdiversifikasinya komoditas ekspor dan lebih besarnya peran negara-negara *emerging markets* sebagai pasar tujuan ekspor Indonesia. Permintaan eksternal dan domestik yang kuat berpengaruh positif bagi optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian, sehingga pada akhirnya mendorong kinerja investasi tumbuh meningkat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat ditopang oleh daya beli masyarakat yang terjaga didukung meningkatnya peran pembiayaan lembaga keuangan. Tingginya permintaan domestik dan eksternal pada gilirannya berdampak pada tingginya pertumbuhan impor hingga melebihi pertumbuhan ekspor (Tabel 1.3).

Kinerja ekspor yang meningkat cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Kenaikan kinerja ekspor paling tinggi terjadi di semester I 2010, terutama pada awal tahun, didukung baik oleh komoditas migas maupun nonmigas. Namun, memasuki semester II 2010 ekspor mengalami perlambatan terkait dengan terjadinya penurunan produksi minyak, melambatnya laju pertumbuhan negara mitra dagang, serta harga komoditas manufaktur dan pertanian yang melambat. Kinerja ekspor kembali mencatat kenaikan yang cukup tinggi pada akhir 2010 didorong oleh meningkatnya ekspor produk pertanian dan manufaktur, disertai kenaikan

harga komoditas. Secara keseluruhan, ekspor tahun 2010 mencatat kenaikan yang tinggi, yakni mencapai 14,9%. Pertumbuhan ekspor tersebut merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir – kecuali tahun 2005 – dengan komoditas ekspor yang relatif lebih tidak terkonsentrasi pada hanya beberapa produk tertentu. Selain itu, capaian pertumbuhan ekspor nasional yang tinggi juga disertai meningkatnya pangsa negara-negara *emerging markets* sebagai pasar tujuan ekspor.

Meningkatnya kinerja ekspor dan semakin kondusifnya berbagai variabel makroekonomi berkontribusi pada kinerja investasi yang tumbuh tinggi. Iklim investasi yang membaik didukung oleh pembiayaan dari dalam dan luar negeri yang meningkat sehingga mendorong realisasi investasi tumbuh lebih cepat untuk merespons kenaikan kapasitas utilisasi seiring kuatnya permintaan. Survei Tendensi Bisnis yang dilakukan oleh BPS menunjukkan optimisme pelaku usaha yang positif dengan terus meningkatnya pemesanan barang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harga jual yang naik, serta kenaikan pemesanan barang *input* (Grafik 1.34). Menguatnya nilai tukar rupiah juga turut menunjang impor barang modal dengan harga yang relatif lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, investasi nonbangunan kembali tumbuh tinggi sebesar 13,1% setelah pada tahun 2009 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Sementara itu, investasi bangunan tumbuh stabil sebesar 7,0% (Grafik 1.35). Tingginya perkembangan investasi nonbangunan ini mengisyaratkan sifat investasi yang lebih kepada menambah kapasitas ekonomi. Berdasarkan jenis investasi, peningkatan pertumbuhan investasi didorong



Grafik 1.34. Indeks Tendensi Bisnis

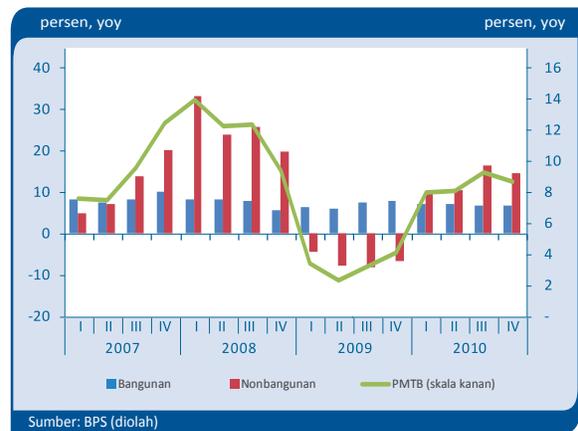
oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat mencapai Rp 208,6 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 60,5 triliun.

Dukungan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri mendorong peningkatan kinerja investasi. Pembiayaan dalam negeri yang meningkat terlihat dari *Initial Public Offering* (IPO) yang meningkat cukup besar sepanjang tahun 2010, baik untuk saham maupun obligasi korporasi. Selain itu, dukungan pembiayaan perbankan terhadap peningkatan investasi terlihat dari pertumbuhan kredit riil investasi yang tumbuh cukup tinggi disertai suku bunga riil yang relatif lebih rendah (Grafik 1.36). Pembiayaan investasi yang bersumber dari luar negeri terlihat dari meningkatnya realisasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) swasta. Secara umum, peningkatan komitmen PLN yang terjadi sepanjang tahun 2010 terutama pada sektor *non-tradable*.

Perkembangan investasi yang cenderung meningkat sejalan dengan semakin membaiknya persepsi pelaku usaha dan investor terhadap iklim investasi Indonesia. Perbaikan iklim investasi tersebut tidak terlepas dari penerapan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari berbagai laporan dan hasil kajian lembaga yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih baik. Laporan OECD menunjukkan Indonesia bersama tujuh negara G20 lainnya<sup>4</sup> sebagai negara yang telah memiliki kejelasan aturan investasi yang lebih baik dan menerapkan regulasi investasi yang menuju tren liberalisasi investasi<sup>5</sup>. Perbaikan iklim investasi di Indonesia

4 Australia, Brazil, Kanada, China, India, Arab Saudi, dan Afrika Selatan

5 Third Report on G20 Investment Measures, OECD dan Sekretariat UNCTAD, Juni 2010

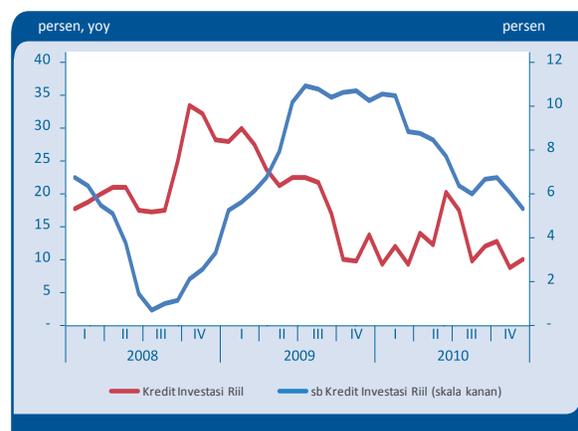


Grafik 1.35 Investasi Bangunan dan Nonbangunan

juga tercermin pada peringkat daya saing Indonesia yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF). Dalam hal ini, Indonesia berada dalam posisi yang meningkat dari 54 menjadi peringkat 44 pada tahun 2010<sup>6</sup>. WEF menekankan pada terjaganya stabilitas makroekonomi sebagai sumber utama perbaikan daya saing perekonomian Indonesia. Namun, peringkat infrastruktur jalan dan energi yang masih rendah menghambat peningkatan daya saing Indonesia lebih tinggi lagi. Persepsi positif tentang ekspektasi kondisi makroekonomi Indonesia juga tercermin dari perkembangan *sovereign credit rating* Indonesia yang terus membaik dan membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih cepat mencapai peringkat layak investasi.

Sementara itu, walaupun sedikit melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat dan turut berperan

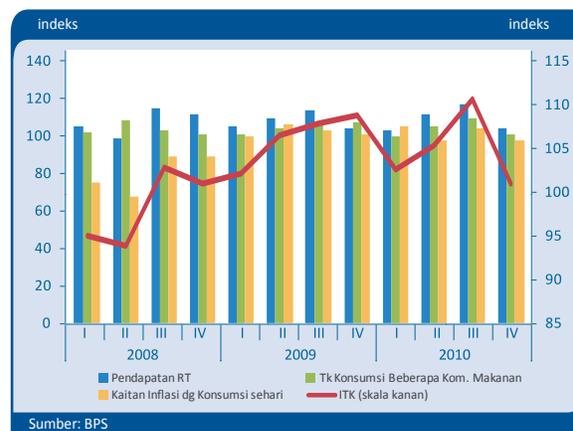
6 The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, 2010



Grafik 1.36. Pertumbuhan Riil Kredit dan Suku Bunga Investasi

dalam mendukung capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,6%, sedikit lebih lambat dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 4,9%. Dorongan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2010 ditopang oleh masih kuatnya daya beli rata-rata masyarakat, nilai tukar rupiah yang terapresiasi, peningkatan pembiayaan kredit konsumsi, serta masih terjaganya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian yang masih terjaga tergambar dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh beberapa lembaga, meskipun optimisme yang terbangun sedikit menurun di akhir tahun terkait dengan meningkatnya harga pangan (Grafik 1.37). Dilihat dari komponennya, perkembangan konsumsi rumah tangga pada tahun 2010 terutama ditunjang oleh peran konsumsi bukan makanan yang tumbuh mencapai 5,6% (Grafik 1.38).

Daya beli masyarakat yang relatif mengalami perbaikan berkontribusi pada kuatnya konsumsi rumah tangga. Masyarakat berpendapatan menengah ke atas merupakan kelompok masyarakat yang terutama mengalami perbaikan daya beli. Hal ini antara lain tergambar dari hasil survei Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan penghasilan yang diterima terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran bulanan di atas Rp 5 juta (Grafik 1.39). Survei gaji yang dilakukan oleh suatu lembaga riset independen menunjukkan kenaikan gaji karyawan di berbagai sektor pada tahun 2010 rata-rata sebesar 11%. Kenaikan gaji di sektor industri barang konsumsi sehari-hari (*fast moving consumer goods*) - seperti produsen makanan dan minuman jadi, perawatan tubuh, serta kebutuhan rumah tangga - di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara

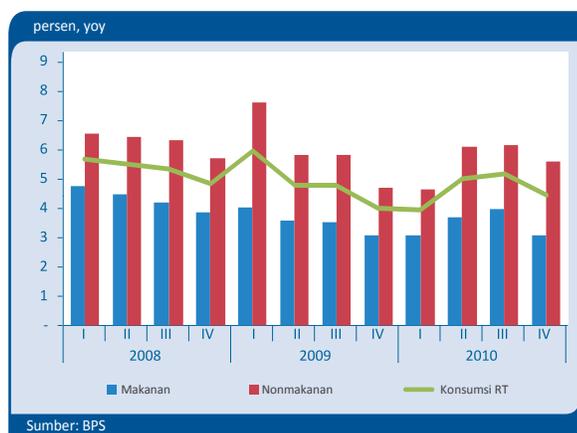


**Grafik 1.37. Indeks Tendensi Konsumen - BPS**

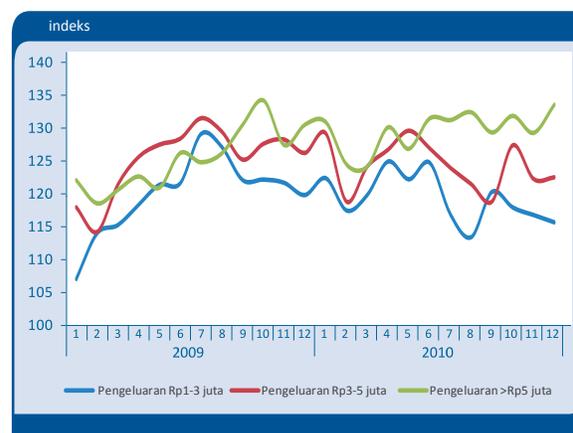
kawasan Asia Pasifik<sup>7</sup>. Sementara itu, daya beli petani juga relatif membaik sebagaimana tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada dalam tren meningkat. Meskipun demikian, peningkatan NTP lebih didorong oleh kelompok petani hortikultura dan petani tanaman pangan terkait dengan kenaikan harga kedua komoditas pangan tersebut yang cukup tinggi sejak pertengahan tahun 2010 (Grafik 1.40).

Konsumsi pemerintah yang tumbuh terbatas pada gilirannya berpengaruh pada kinerja konsumsi secara keseluruhan. Kondisi ini tidak terlepas dari capaian defisit APBN yang hanya sebesar 0,6%, jauh berada di bawah targetnya yang sebesar 2,1%. Pada paruh pertama 2010, konsumsi pemerintah bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan meskipun memasuki paruh kedua kembali mencapai pertumbuhan yang positif.

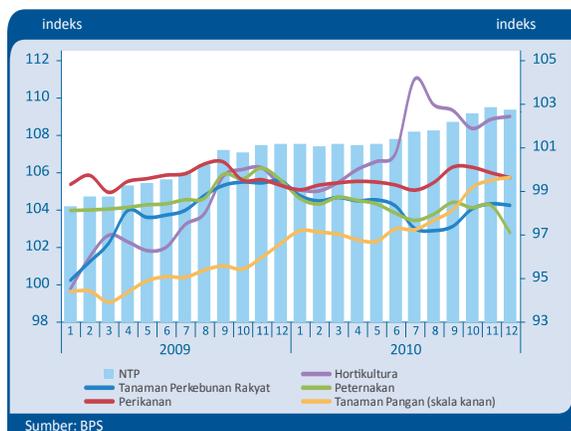
7 BTI Consultants



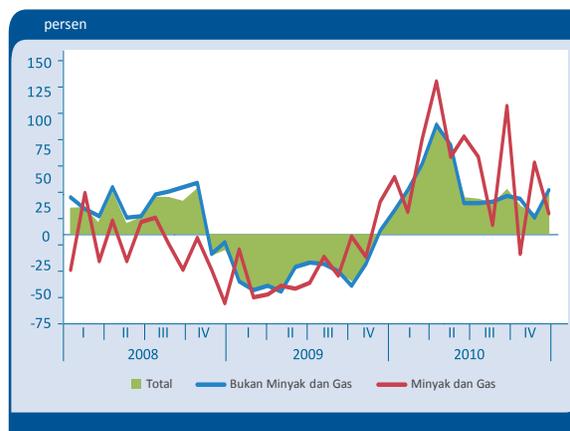
**Grafik 1.38. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga**



**Grafik 1.39. Indeks Penghasilan Saat Ini Berdasarkan Kelompok Pengeluaran – Survei Konsumen BI**



Grafik 1.40 Nilai Tukar Petani



Grafik 1.41 Pertumbuhan Impor

Penyerapan belanja APBN yang lebih rendah terutama disebabkan oleh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lainnya yang tidak mencapai target. Hanya pada komponen belanja subsidi, penyerapan belanja melebihi targetnya. Secara keseluruhan tahun, kontribusi konsumsi dan investasi pemerintah ke sektor riil melambat dibandingkan tahun 2009 akibat kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah yang cukup dalam pada semester I-2010. Dengan perkembangan ini, konsumsi Pemerintah pada tahun 2010 tumbuh 0,3%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 15,7%.

Permintaan domestik dan permintaan eksternal yang kuat juga direspons oleh kenaikan pertumbuhan impor, baik nonmigas maupun migas. Pada tahun 2010, impor tumbuh tinggi sebesar 17,3% setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam yakni 15,0%. Tingginya pertumbuhan impor tersebut

juga didukung oleh penguatan nilai tukar rupiah yang menyebabkan relatif lebih rendahnya harga barang impor. Kenaikan impor barang konsumsi yang cukup tinggi, terutama berupa makanan jadi dan kendaraan penumpang, sejalan dengan tingginya permintaan konsumsi domestik. Sementara itu, tingginya permintaan ekspor mendorong naiknya kebutuhan impor bahan baku untuk input produksi barang manufaktur. Kegiatan produksi yang meningkat berpengaruh positif pada optimisme pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan merealisasikan investasi sehingga mendorong naiknya pertumbuhan impor barang modal. Sementara itu, impor migas yang meningkat terkait dengan naiknya kebutuhan konsumsi BBM domestik (Grafik 1.41).

Meningkatnya peran ekspor dan investasi yang disertai tetap kuatnya konsumsi rumah tangga terlihat pada

Tabel 1.4 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha

persen

Sektor	2007	2008	2009*				2009	2010**				2010
			I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian	3,5	4,8	5,7	2,8	3,4	4,1	4,0	3,0	3,1	1,8	3,8	2,9
Pertambangan & Penggalian	1,9	0,7	2,6	3,5	6,3	5,3	4,4	3,1	3,9	2,7	4,2	3,5
Industri Pengolahan	4,7	3,7	1,5	1,5	1,3	4,5	2,2	3,9	4,5	4,3	5,3	4,5
Listrik, Gas & Air Bersih	10,3	10,9	11,6	15,6	14,9	14,9	14,3	8,8	5,1	3,4	4,3	5,3
Bangunan	8,5	7,5	6,3	6,1	7,7	8,1	7,1	7,3	7,2	6,8	6,7	7,0
Perdagangan, Hotel & Restoran	8,9	6,9	1,2	0,5	-0,1	3,7	1,3	8,6	9,1	8,7	8,4	8,7
Pengangkutan & Komunikasi	14,0	16,6	16,8	17,0	16,1	12,4	15,5	12,0	13,0	13,2	15,5	13,5
Kuangan, Persewaan & Jasa	8,0	8,2	6,2	5,3	4,9	3,8	5,1	4,8	5,6	5,9	6,3	5,7
Jasa-jasa	6,4	6,2	6,6	7,2	6,1	5,8	6,4	4,7	5,3	6,4	7,5	6,0
<b>PDB</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>

Sumber: BPS

\*angka sementara \*\*angka sangat sementara

kinerja PDB sektoral (Tabel 1.4). Kinerja sektor industri pengolahan berada dalam tren yang meningkat sejak awal tahun sejalan dengan peningkatan kinerja ekspor dan kuatnya permintaan domestik. Secara keseluruhan tahun, sektor industri pengolahan tumbuh 4,5%. Perkembangan tersebut cukup menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya sektor ini hanya tumbuh sebesar 2,2%. Pada sektor *non-tradable*, perbaikan pertumbuhan terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR); serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan terkait dengan aktivitas perekonomian domestik yang diiringi oleh peningkatan impor. Sementara itu, perbaikan sektor keuangan lebih terkait dengan peningkatan pemberian kredit, baik dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Perbaikan kinerja ketiga sektor tersebut cukup berperan besar terhadap aktivitas ekonomi keseluruhan karena memiliki pangsa yang besar.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang meningkat pada tahun 2010 belum mampu mendorong kinerja sektor *tradable* tumbuh lebih tinggi dari sektor *non-tradable* dalam perekonomian. Sektor *tradable* tumbuh 3,9%, sementara sektor *non-tradable* tumbuh hingga 8,2%. Tingginya pertumbuhan sektor *non-tradable* menyebabkan perannya dalam perekonomian terus meningkat. Sementara itu, kembali meningkatnya pertumbuhan sektor industri pada kisaran rata-rata pertumbuhannya sebelum krisis keuangan global berdampak pada membaiknya kontribusi sektor *tradable* dalam perekonomian. Namun, tingkat pertumbuhan yang dicapai sektor industri pengolahan pada tahun 2010 masih berada di bawah rata-rata tertingginya pada periode 1986-1996 yaitu sebesar 10,5%. Di sisi lain, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan tersebut tidak diikuti oleh

sektor *tradable* lainnya. Di sektor pertanian, permasalahan seperti penurunan produktivitas dan luas lahan, disertai anomali cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2010 menyebabkan capaian pertumbuhan di sektor ini lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja sektor pertambangan yang relatif terhambat akibat terjadinya berbagai gangguan produksi minyak seperti kerusakan beberapa kilang, selain juga faktor cuaca yang kurang mendukung bagi akitivitas kegiatan produksi.

## ■ Inflasi

Tekanan inflasi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi IHK meningkat menjadi 6,96% dari 2,78% di tahun sebelumnya dan berada di atas sasaran inflasi 2010 yang ditetapkan di angka  $5\% \pm 1\%$  (lihat Boks 1.1: Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi 2010). Perkembangan inflasi yang meningkat tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor domestik yang terjadi sepanjang tahun 2010. Dari sisi eksternal, peningkatan inflasi sejalan dengan meningkatnya inflasi global, khususnya di negara-negara *emerging markets*, sebagai imbas meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan harga-harga komoditas internasional. Namun, pengaruh penguatan nilai tukar rupiah pada tahun ini mampu meminimalkan dampak dari peningkatan harga-harga komoditas global tersebut. Dari sisi domestik; perkembangan ekspektasi inflasi, kondisi permintaan dan penawaran, serta penyesuaian tarif komoditas *administered* relatif tidak memberikan tekanan kenaikan inflasi yang berlebihan. Tekanan kenaikan inflasi muncul terutama akibat terganggunya kelancaran pasokan bahan makanan yang banyak terpengaruh oleh anomali cuaca.

**Tabel 1.5 Inflasi Menurut Kelompok Barang**

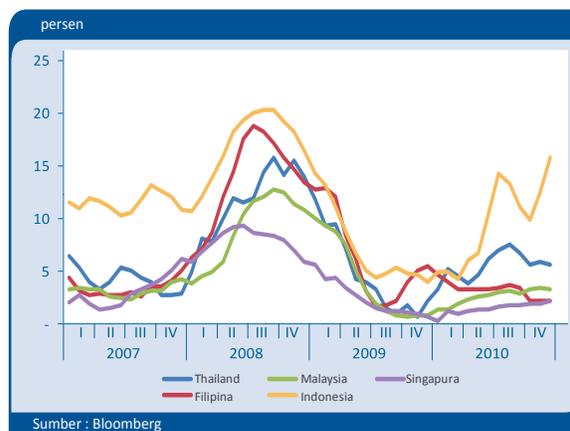
*persen*

	Kelompok	Bobot	2007	2008	2009	2010
		(SBH 2007)				
1	Bahan Makanan	19,57	10,74	16,35	3,88	15,64
2	Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau	16,55	5,70	12,53	7,81	6,96
3	Perumahan, Listrik, dan Air Bersih	25,41	4,85	10,92	1,83	4,08
4	Sandang	7,09	7,53	7,33	6,00	6,51
5	Kesehatan	4,44	3,52	7,96	3,89	2,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	7,81	6,94	6,66	3,89	3,29
7	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	19,12	0,46	7,49	-3,67	2,69
	<b>Inflasi IHK</b>	<b>100,00</b>	<b>5,61</b>	<b>11,06</b>	<b>2,78</b>	<b>6,96</b>

Sumber: BPS (diolah)



Grafik 1.42 Inflasi IHK dan Komponennya



Grafik 1.43 Inflasi Bahan Pangan Negara-negara Kawasan

Berdasarkan kelompok barang, inflasi tertinggi secara berurutan dialami oleh kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau; kelompok sandang; dan kelompok perumahan, listrik, dan air bersih. (Tabel 1.5). Pada kelompok bahan makanan, tingginya inflasi terutama disebabkan oleh gangguan distribusi bahan makanan terkait dengan terjadinya anomali cuaca. Kondisi ini selanjutnya berpengaruh pada tingginya inflasi kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau akibat peningkatan harga bahan baku yang sangat tinggi. Kenaikan inflasi kelompok sandang bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan seiring perkembangan harga emas internasional yang pada tahun laporan meningkat cukup tajam. Selanjutnya, pada kelompok perumahan, listrik, dan air bersih, meningkatnya inflasi terutama disebabkan oleh kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sementara itu, ketiga kelompok lainnya yang tergolong pada sektor jasa mengalami inflasi yang rendah. Hal ini tidak terlepas dari kinerja sektor jasa yang tumbuh tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang diduga juga disertai tingginya peningkatan kapasitas sektor ini. Perkembangan ini terutama terlihat pada sektor-sektor terkait jasa dalam

PDB, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Dilihat dari sumber tekanannya, tingginya inflasi IHK pada tahun 2010 terutama berasal dari inflasi komponen *volatile food* yang pada tahun ini peningkatannya mencapai 17,74%, melonjak tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat angka 3,95% (Grafik 1.42). Sampai dengan akhir semester I 2010, inflasi IHK masih relatif rendah yaitu berada pada angka 5,05%. Namun, memasuki semester II 2010, terganggunya distribusi pada berbagai komoditas pangan sebagai akibat dari pengaruh anomali cuaca menyebabkan inflasi komponen *volatile food* meningkat tajam. Inflasinya yang mencapai 16,18% pada Juli 2010 menekan inflasi IHK hingga mencapai 6,22%. Peningkatan inflasi komponen *volatile food* ini juga dialami oleh beberapa negara lain, seperti tercermin pada inflasi kelompok bahan pangan di negara-negara kawasan yang juga mengalami peningkatan di periode yang sama (Grafik 1.43). Namun, secara fundamental, perkembangan inflasi pada dasarnya masih tetap stabil seperti tercermin pada inflasi inti yang masih

Tabel 1.6 Perkembangan Komponen Inflasi IHK

Komponen	Bobot	2007	2008	2009	2010
	(SBH 2007)				
Inti	65,6	6,29	6,29	4,28	4,28
Administered prices	16,1	11,41	16,48	(3,26)	5,40
Volatile food	18,3	3,30	15,99	3,95	17,74
<b>Inflasi IHK</b>	<b>100,0</b>	<b>5,61</b>	<b>11,06</b>	<b>2,78</b>	<b>6,96</b>

Sumber: BPS (diolah)

tetap sama dengan tahun sebelumnya (4,28%). Hal ini didukung oleh terkendalinya faktor-faktor fundamental yang memengaruhi inflasi, sebagaimana diindikasikan oleh penguatan nilai tukar rupiah, terjaganya ekspektasi inflasi serta tersedianya kapasitas perekonomian yang masih dapat memenuhi tekanan permintaan. Sementara itu, berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan penetapan harga meningkatkan inflasi *administered prices* ke tingkat yang moderat yaitu sebesar 5,40%.

## Inflasi Inti

Inflasi inti, sebagai komponen yang lebih dapat mencerminkan pengaruh makroekonomi terhadap perkembangan harga-harga, pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang stabil di angka 4,28%. (Tabel 1.6). Sejak akhir 2009, inflasi inti sempat menurun mencapai level terendahnya di bulan Maret 2010 dan kemudian secara perlahan meningkat kembali ke angka semula di akhir tahun 2010. Hal ini terkait dengan perkembangan faktor-faktor determinan yang secara fundamental memengaruhi inflasi sepanjang tahun 2010. Faktor-faktor determinan inflasi ini bersumber baik dari eksternal maupun domestik.

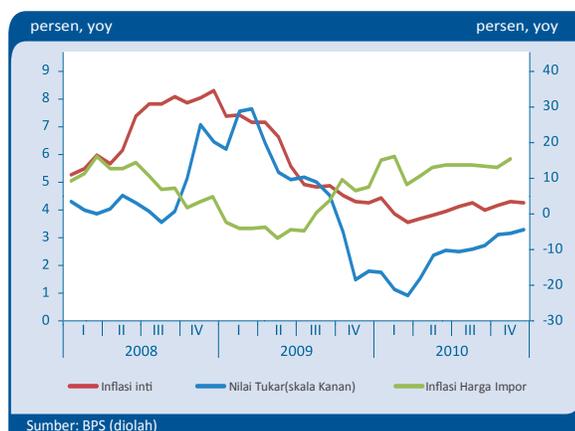
Dari sisi eksternal, kenaikan signifikan harga komoditas internasional sepanjang tahun 2010, yang tercermin pada harga komoditas impor Indonesia, berdampak minimal terhadap inflasi inti. Kondisi ini terjadi karena pada saat yang bersamaan nilai tukar rupiah menguat cukup tajam sehingga dapat mengurangi dampak kenaikan harga komoditas tersebut. Bahkan, penguatan nilai tukar rupiah tersebut mampu menurunkan inflasi inti hingga menjadi 3,56% di bulan Maret 2010. Selanjutnya, kenaikan harga impor yang terus meningkat mulai berdampak pada

kenaikan inflasi inti seiring dengan penguatan nilai tukar yang semakin mereda (Grafik 1.44).

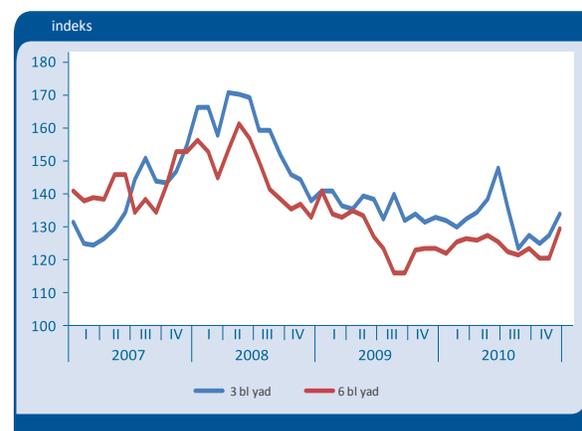
Dari sisi domestik, relatif terjaganya perkembangan ekspektasi inflasi dan kondisi sisi penawaran yang terindikasi masih dapat mengimbangi permintaan agregat berpengaruh pada minimalnya tekanan inflasi inti. Sepanjang tahun 2010, ekspektasi inflasi tetap terjaga meskipun sempat meningkat sejalan dengan lonjakan harga bahan pangan di pertengahan tahun. Kondisi ini tercermin pada perkembangan ekspektasi kenaikan harga, baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Tendensi kenaikan harga yang diekspektasikan pedagang tidak mengalami peningkatan sejak paruh kedua tahun 2009 (Grafik 1.45). Sementara itu, dari sisi konsumen, walaupun mengalami peningkatan, tendensi kenaikan harga yang diekspektasikan masih berada di bawah rata-rata tertinggi yang pernah dicapai dalam dua tahun terakhir, yaitu di paruh pertama tahun 2008 sebesar 182 (Grafik 1.46). Kondisi pada tahun 2010 berada di level yang moderat yaitu 162, berada di bawah rata-rata historisnya (2002-2008) yang mencapai 172. Dari sisi keseimbangan permintaan dan penawaran agregat, kondisi penawaran yang masih dapat mengimbangi permintaan tercermin pada masih normalnya tingkat penggunaan kapasitas produksi (Grafik 1.47)

## Inflasi *Volatile Food* dan *Administered Prices*

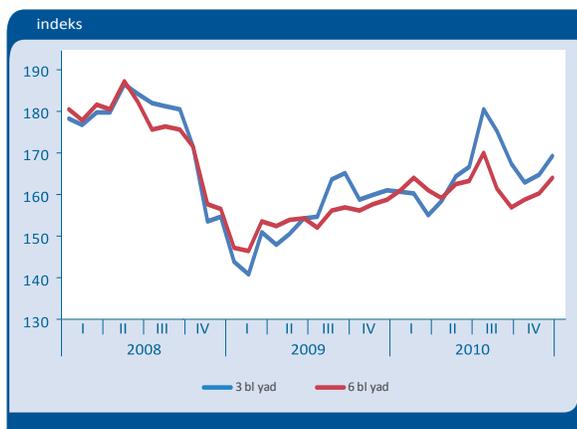
Inflasi kelompok bahan makanan yang bergejolak (*volatile food*) pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Perkembangannya yang cukup ekstrem mendominasi perkembangan inflasi IHK dan berperan besar atas tidak tercapainya sasaran inflasi yang telah ditetapkan untuk tahun 2010. Faktor cuaca merupakan penyebab



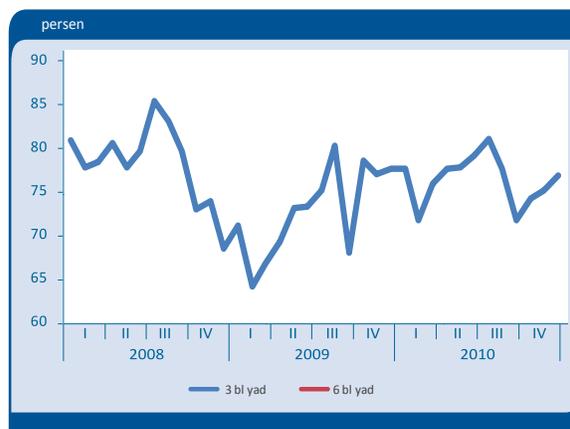
Grafik 1.44 Inflasi Inti dan Determinan Eksternalnya



Grafik 1.45 Ekspektasi Inflasi Pedagang



**Grafik 1.46** Ekspektasi Inflasi Konsumen

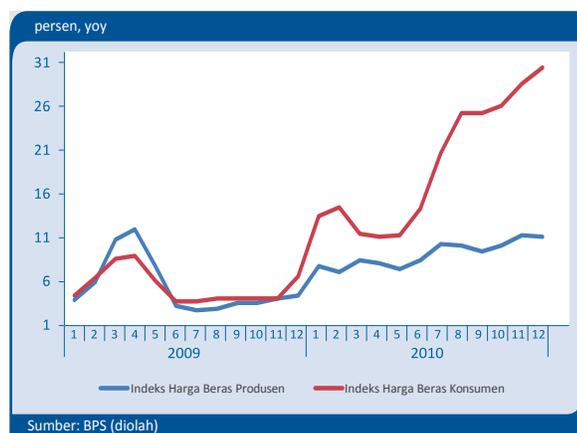


**Grafik 1.47** Kapasitas Produksi Terpakai Industri

utama kenaikan harga komoditas yang tergolong dalam *volatile food*, melalui pengaruhnya pada ketersediaan pasokan bahan makanan. Anomali cuaca yang terjadi pada tahun 2010 berupa curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan telah menyebabkan penurunan produksi dan terganggunya distribusi pada berbagai komoditas pangan mentah, seperti beras dan aneka bumbu (lihat Boks 1.2: Anomali Cuaca dan Produksi Bahan Pangan). Gejala harga beras berkontribusi besar terhadap inflasi sepanjang tahun 2010 sehingga mengakselerasi tekanan inflasi *volatile food*, terutama di paruh kedua tahun 2010. Secara umum, kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan cuaca tersebut juga terjadi di beberapa negara kawasan. Di sisi domestik, selain terkendala oleh kondisi cuaca, kenaikan harga komoditas pangan disinyalir juga didorong oleh perilaku spekulatif pedagang, sebagaimana terindikasi dari melebarnya margin harga komoditas beras di tingkat produsen dan konsumen (Grafik 1.48). Menyikapi perkembangan yang terjadi, pemerintah terus

mengupayakan kebijakan stabilisasi harga, baik melalui penyaluran raskin, operasi pasar, maupun dibukanya keran impor. Meskipun demikian, langkah untuk melakukan impor beras hingga 600 ribu ton di akhir tahun 2010 belum terlihat dapat meredam gejolak harga beras. Selain itu, kenaikan harga CPO di pasar dunia berimbas pada meningkatnya harga minyak goreng domestik dan menjadikan komoditas ini sebagai salah satu penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan terakhir 2010 (Tabel 1.7).

Sepanjang 2010, kelompok *administered prices* memberikan kontribusi inflasi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terutama akibat penyesuaian tarif dasar listrik. Peningkatan inflasi *administered prices* yang cukup signifikan pada awal semester II 2010 akibat pemberlakuan kenaikan TDL per 1 Juli, disusul oleh kenaikan biaya jasa perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Agustus 2010. Penyesuaian harga TDL tersebut berdampak besar pada perkembangan inflasi *administered prices* di tahun 2010, dengan dampak langsungnya terhadap inflasi mencapai 0,38% (Tabel 1.8). Meskipun demikian, penyesuaian tarif listrik tersebut relatif tidak berpengaruh secara signifikan pada peningkatan harga komoditas lain serta ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, kenaikan biaya jasa penerbitan STNK dan SIM memberikan dampak inflasi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,23%. Di sisi lain, program konversi minyak tanah berjalan cukup lancar tanpa kendala kelangkaan yang berarti sehingga berkontribusi secara terbatas pada laju inflasi. Kondisi ini tercermin pada minimalnya kenaikan harga bahan bakar rumah tangga (2.14%)



**Grafik 1.48** Pertumbuhan Indeks Harga Beras di Tingkat Produsen dan Konsumen

**Tabel 1.7** Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas Volatile Food

Komoditas	Kenaikan Harga (%)	Sumbangan Inflasi (%)
Beras	30,45	1,26
Cabai Merah	62,90	0,29
Bawang Merah	68,19	0,23
Cabai Rawit	124,85	0,19
Daging Ayam Ras	10,52	0,15
Bawang Putih	49,98	0,15
Minyak Goreng	9,59	0,12
Telur Ayam Ras	10,12	0,07

Sumber: BPS (diolah)

**Tabel 1.8** Sumbangan Inflasi Beberapa Komoditas Administered Prices

Komoditas	Kenaikan Harga (%)	Sumbangan Inflasi (%)
Tarif Listrik	15,80	0,38
Jasa Perpanjangan STNK	75,40	0,23
Rokok Kretek Filter	7,33	0,14
Rokok Kretek	6,76	0,08
Bahan Bakar Rumah Tangga	2,14	0,07
Rokok Putih	9,24	0,04

Sumber: BPS (diolah)

## ■ Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Regional<sup>8</sup>

Dinamika perekonomian global yang mewarnai pemulihan ekonomi domestik secara umum memberi pengaruh positif bagi kinerja perekonomian daerah (Tabel 1.9). Perekonomian Jakarta dan Jawa kembali mencatat laju pertumbuhan di atas 6,0% pada tahun 2010, di atas capaian tahun 2009 yang masing-masing tumbuh sebesar 5,0% dan 4,7%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kedua kawasan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan sejalan dengan kuatnya permintaan domestik dan ekspor barang manufaktur. Sementara itu, ekonomi Sumatera pada tahun 2010 tumbuh meningkat dari 3,5% menjadi 5,4%. Kinerja produksi perkebunan yang masih meningkat di tengah terpaan anomali cuaca yang menghambat kegiatan produksi mampu mendorong perekonomian Sumatera tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) berada di kisaran 5,5%, meskipun lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2009. Kinerja sektor pertambangan di Kalimantan yang masih meningkat dapat mengimbangi melemahnya kinerja produksi komoditas tambang di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Secara keseluruhan, faktor tingginya harga komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) di pasar dunia menopang kinerja perekonomian Sumatera dan KTI tetap tumbuh tinggi.

<sup>8</sup> Bank Indonesia membagi asesmen perekonomian daerah menjadi empat kawasan yang masing-masing terdiri dari beberapa wilayah, yaitu Sumatera (terdiri dari Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Tengah, dan Sumatera Bagian Selatan); Jakarta; Jawa (terdiri dari Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, dan Jawa Bagian Timur); dan Kawasan Timur Indonesia (terdiri dari Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi-Maluku-Papua).

Di sisi inflasi, gejala kenaikan harga komoditas *volatile food* mendorong peningkatan tekanan inflasi di berbagai daerah. Sumatera dan KTI merupakan dua kawasan dengan kenaikan inflasi yang paling tinggi yaitu masing-masing mencapai 7,86% dan 7,56%. Sementara itu, inflasi di Jawa dan Jakarta tercatat masing-masing sebesar 7,36% dan 6,21%. Lonjakan kenaikan harga aneka bumbu dan beras berpengaruh besar pada terjadinya inflasi di seluruh daerah. Faktor terjadinya anomali cuaca yang ditandai tingginya intensitas hujan pada tahun 2010 menyebabkan terbatasnya produktivitas bahan makanan, khususnya tanaman hortikultura, di berbagai daerah sentra produksi. Kenaikan inflasi yang lebih tinggi di Sumatera dan KTI dipengaruhi oleh tekanan produksi pangan akibat gangguan anomali cuaca di tengah masih terbatasnya kapasitas produksi lokal untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat. Permintaan konsumsi masyarakat lokal yang belum dapat diimbangi oleh kapasitas produksi lokalnya menyebabkan daerah memiliki suatu ketergantungan pada daerah lainnya yang merupakan sentra produksi. Selain itu, belum adanya data dan informasi serta kondisi pasokan yang terintegrasi dan terbuka menyebabkan harga rentan dipengaruhi isu, di tengah tingginya risiko terjadinya berbagai hal yang menghambat distribusi logistik akibat masih terbatasnya konektivitas antardaerah. Selain itu, penerapan kebijakan kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah antara lain TDL, kenaikan biaya perpanjangan STNK dan SIM juga turut berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi berbagai daerah pada tahun 2010. Kenaikan tarif angkutan lintas provinsi yang berlaku efektif pada akhir tahun 2010 diperkirakan juga berimplikasi pada meningkatnya biaya distribusi barang khususnya ke luar Jawa.

Tabel 1.9 Pertumbuhan PDRB Wilayah

Wilayah	Pertumbuhan PDRB (%yoy)			Inflasi IHK (%yoy)		
	2008	2009*	2010**	2008	2009	2010
<b>SUMATERA</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>11,37</b>	<b>2,44</b>	<b>7,83</b>
Sumatera Bag. Utara	3,3	2,5	5,7	10,84	2,72	7,79
Sumatera Bag. Tengah	6,1	3,7	5,0	10,51	1,93	7,85
Sumatera Bag. Selatan	5,1	4,4	5,8	13,00	2,75	7,86
<b>JAKARTA</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	<b>6,5</b>	<b>11,11</b>	<b>2,34</b>	<b>6,21</b>
<b>JAWA</b>	<b>5,8</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>10,54</b>	<b>2,73</b>	<b>7,36</b>
Jawa Bag. Barat	5,8	4,4	6,0	11,27	2,27	7,59
Jawa Bag. Tengah	5,4	4,7	5,7	9,60	3,26	6,96
Jawa Bag. Timur	5,9	5,0	6,7	9,51	3,41	7,10
<b>KTI</b>	<b>5,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,90</b>	<b>3,91</b>	<b>7,56</b>
Balnustra	4,6	6,3	5,8	11,02	4,39	9,05
Kalimantan	5,3	3,3	5,3	12,10	3,95	8,14
Sulampua	6,1	8,9	5,7	12,10	3,67	6,40

Sumber: BPS (diolah)

\* Angka sementara \*\* Angka sangat sementara

Sepanjang tahun 2010, upaya untuk meredam gejala di sisi penawaran yang dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)<sup>9</sup> difokuskan pada upaya memperkuat stok pasokan bahan makanan dan menggiring ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pangan. Intensifikasi kegiatan yang dilakukan oleh TPID sepanjang tahun 2010 antara lain dilakukan melalui optimalisasi strategi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah yang lebih dapat menjangkau seluruh wilayah dengan upaya untuk lebih memperhatikan karakteristik konsumsi masyarakat daerah, inspeksi langsung di lapangan oleh pejabat Pemerintah Daerah bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk memantau ketersediaan stok dan mengantisipasi adanya aksi spekulasi, dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui media massa. Selain itu, adanya keterkaitan arus barang yang tinggi antardaerah juga memerlukan upaya untuk memperkuat koordinasi TPID lintas daerah. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian TPID di berbagai daerah dalam upaya mengendalikan harga antara lain (1) penguasaan distribusi komoditas pangan strategis pada kelompok pedagang besar disertai rantai distribusi yang panjang berpengaruh besar pada pola pembentukan harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, kenaikan harga pangan tidak secara simetris dinikmati oleh petani, ditandai margin harga di tingkat produsen dan konsumen yang melebar; (2) keterbatasan akses informasi terhadap kondisi pasokan dan harga

komoditas pangan strategis menyebabkan rentannya harga dipengaruhi oleh isu maupun ekspektasi; dan (3) ketergantungan pasokan yang tinggi antardaerah belum diimbangi adanya suatu mekanisme penyangga pasokan yang fleksibel dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan konsumsi pangan masyarakat lokal.

## ■ Pengangguran dan Kemiskinan

Membaiknya kondisi perekonomian domestik memberi dampak yang positif bagi penyerapan tenaga kerja. (Tabel 1.10). Data ketenagakerjaan terakhir menunjukkan tingkat pengangguran yang berada dalam tren menurun, disertai adanya pergeseran struktur tenaga kerja yang kembali kepada sektor formal, dan membaiknya kualitas pendidikan tenaga kerja. Angka pengangguran terbuka tahun 2010 tercatat sebesar 7,14%, lebih rendah dibanding periode tahun sebelumnya yang sebesar 7,87%. Sementara itu, komposisi partisipasi angkatan kerja pada sektor formal meningkat dari 30% pada tahun 2009 menjadi 33% (Grafik 1.49).

Pulihnya kembali peran sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja diharapkan berdampak positif pada kesinambungan konsumsi rumah tangga, terutama dengan lebih terjaminnya tingkat pendapatan yang memadai. Perkembangan positif lainnya juga terlihat pada kualitas tenaga kerja yang membaik. Pada tahun 2010 komposisi tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan dasar

9 Sampai dengan akhir tahun 2010 telah terbentuk 53 TPID di berbagai kota/kabupaten

Tabel 1.10 Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

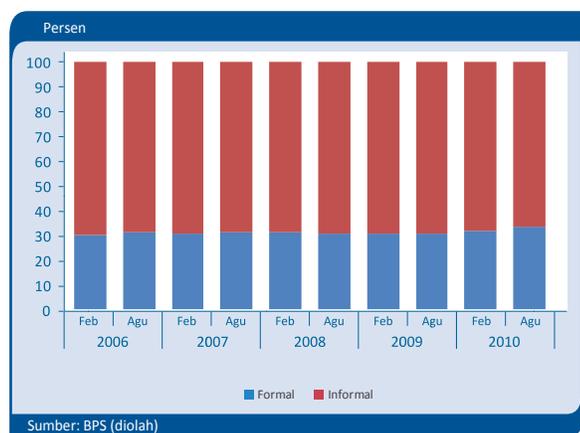
Kegiatan Utama	2008		2009		2010	
	Feb	Agu	Feb	Agu	Feb	Agu
1 Penduduk 15+	165,6	166,6	168,3	169,3	171,0	172,1
2 Angkatan Kerja	111,5	112,0	113,7	113,8	116,0	116,5
- Bekerja	102,1	102,6	104,5	104,9	107,4	108,2
- Penganggur	9,4	9,4	9,3	9,0	8,6	8,3
3 Bukan Angkatan Kerja	54,1	54,7	54,5	55,5	55,0	55,5
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,3	67,2	67,6	67,2	67,8	67,7
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,5	8,4	8,1	7,9	7,4	7,1
6 Pekerja tidak penuh	30,6	31,1	31,4	31,6	32,8	33,3

Sumber: BPS

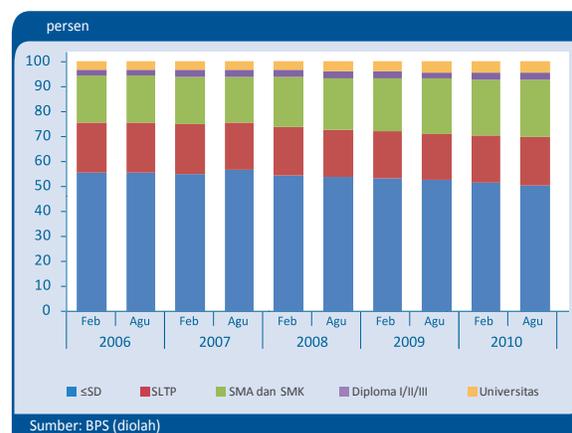
berada dalam tren yang menurun, sebaliknya komposisi tenaga kerja dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan (Grafik 1.50). Program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi perbaikan kualitas pendidikan tenaga kerja tersebut. Walaupun secara keseluruhan kondisi ketenagakerjaan terlihat berada dalam tren yang membaik, persoalan terkait tingginya pengangguran yang dimiliki tingkat pendidikan tinggi dan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja tetap perlu menjadi perhatian.

Pasca tahun 1997, pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada sektor *non-tradable*, sementara sektor *tradable* meskipun membaik namun cenderung tumbuh pada tingkat yang relatif moderat. Karakteristik sektor *non-tradable* yang lebih bersifat padat modal menyebabkan pertumbuhan yang tinggi tidak serta merta memperkuat daya serap tenaga kerja. Sementara sektor *tradable*,

kecuali sektor pertambangan, cenderung bersifat padat karya. Namun, dengan tingkat pertumbuhan sektor *tradable* yang moderat, maka dampaknya pada penciptaan lapangan kerja baru juga tidak begitu besar. Cerminan tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral tersebut juga dapat dilihat dari keeratan hubungan antara pertumbuhan PDB masing-masing sektor dengan pertumbuhan tenaga kerjanya. Berdasarkan nilai korelasi rekursif, diperoleh indikasi bahwa sektor *non-tradable* pada umumnya mempunyai keeratan hubungan yang lebih lemah ketimbang sektor *tradable*. Sementara itu, persoalan tingginya angka pengangguran pada jenjang pendidikan diploma dan perguruan tinggi juga menjadi salah satu agenda penting yang perlu memperoleh prioritas penanganan. Gejala ini di satu sisi merupakan indikasi dari kurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja berlatar belakang pendidikan tinggi. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan adanya pandangan tenaga kerja



Grafik 1.49 Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama



Grafik 1.50 Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 1.11 Rasio Gini dan Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Indonesia**

Daerah/Tahun	Rasio Gini	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bl)			Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin
		Makanan	Bukan Makanan	Total		
<b>Perkotaan</b>						
2008	0,367	143.897	60.999	204.896	12,77	11,65
2009	0,362	155.909	66.214	222.123	11,91	10,72
2010	0,352	163.077	69.912	232.989	11,10	9,87
<b>Pedesaan</b>						
2008	0,300	127.207	34.624	161.831	22,19	18,93
2009	0,288	139.331	40.503	179.834	20,62	17,53
2010	0,297	148.939	43.415	192.354	19,93	16,56
<b>Kota + Desa</b>						
2008	0,367	135.270	47.366	182.636	34,96	15,42
2009	0,357	147.339	52.923	200.262	32,53	14,15
2010	0,331	155.615	56.111	211.726	31,02	13,33

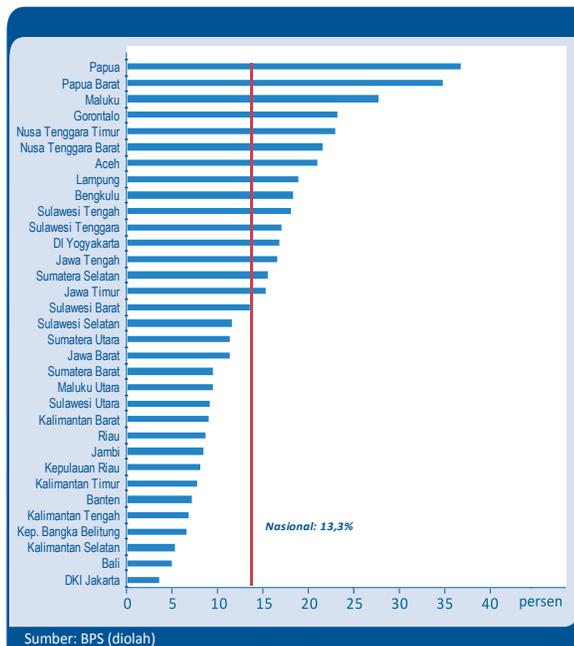
Sumber: BPS

berpendidikan tinggi yang lebih mementingkan bekerja di sektor formal. Meskipun perkembangan lapangan kerja sektor formal sudah membaik namun masih perlu dipacu lebih cepat agar pengangguran yang berpendidikan tinggi ini dapat berkurang disertai upaya meningkatkan paradigma kewiraswastaan.

Sejalan dengan membaiknya tingkat pengangguran, perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia juga

menunjukkan perbaikan (Tabel 1.11). Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33% dari jumlah penduduk. Angka kemiskinan ini lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2009 yang sebanyak 32,53 juta jiwa (14,15% dari jumlah penduduk). Membaiknya angka kemiskinan ini juga disertai membaiknya ketimpangan pendapatan antarmasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio gini yang berada dalam tren menurun. Namun, pada kelompok masyarakat daerah pedesaan perkembangan rasio gini justru mengalami hal yang berkebalikan. Hal ini ditengarai merupakan pengaruh dari perkembangan harga di sektor pertanian yang cenderung tinggi, khususnya subsektor perkebunan di Sumatera dan Kalimantan, sehingga di satu sisi memperbaiki daya beli masyarakat pedesaan namun di sisi lain juga memperlebar disparitas pendapatan yang diterima oleh masyarakat pedesaan. Di samping itu, membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum masih menyisakan permasalahan terkait dengan lebarnya disparitas angka kemiskinan antardaerah yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu DKI Jakarta, dengan daerah yang tingkat kemiskinannya tertinggi yaitu Papua. (Grafik 1.51).

Tingkat kemiskinan pada tahun 2010 relatif mengalami perbaikan. Berbagai program kebijakan yang diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan turut berkontribusi positif pada menurunnya angka kemiskinan. Beberapa program kebijakan yang ditempuh pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya, seperti Program



**Grafik 1.51 Disparitas Kemiskinan Antardaerah di Indonesia – Maret 2010**

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Khusus untuk KUR, penyerapan pada tahun 2010 dapat mencapai target sebesar Rp 13,1 triliun. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR, Pemerintah juga mencanangkan kebijakan pemberian KUR yang diperuntukkan khusus bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhir tahun 2010. Pada bulan Februari 2010,

Pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)<sup>10</sup> sebagai sarana memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam upaya mendukung komitmen Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan hingga 8% – 10% pada 2014<sup>11</sup>.

---

10 Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014

## 1.3

### Respons Kebijakan

Dinamika perekonomian domestik yang terjadi sepanjang tahun 2010 tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjangkar ekspektasi inflasi ke arah sasaran dan menjaga stabilitas makroekonomi. Derasnya aliran masuk modal asing dan tingginya eksese likuiditas semakin meningkatkan kompleksitas kebijakan, sehingga respons terhadap tekanan inflasi tidak dapat hanya bersandar pada instrumen suku bunga. Untuk itu, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan dalam suatu bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak gejala kenaikan harga *volatile food* dan penerapan *administered prices*. Sementara itu, di bidang perbankan, Bank Indonesia melakukan berbagai penyempurnaan aturan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan terhadap berbagai risiko di sektor keuangan dan mendorong peran industri perbankan dalam pembiayaan di sektor riil. Tersedianya dukungan sistem pembayaran yang efisien, handal, mudah, dan aman menjadi penekanan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran nasional.

Sementara itu, kebijakan pemerintah diarahkan pada upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui penerapan berbagai insentif dan stimulus fiskal. Di sisi anggaran, berbagai stimulus diarahkan baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Stimulus fiskal diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya. Selain itu, kebijakan pemberian insentif perpajakan dan bea masuk ditempuh untuk mendorong pemulihan dunia usaha. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah menerapkan strategi manajemen pembiayaan anggaran yang optimal baik

yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Strategi percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional<sup>12</sup> ditempuh oleh Pemerintah dengan penekanan pada upaya memperkuat daya dukung perekonomian secara struktural, seperti melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dan energi. Dalam merespons kenaikan gejala harga pangan yang terjadi, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mengatasi gangguan pasokan dan menjaga daya beli masyarakat.

#### ■ Respons Kebijakan Moneter

Di bidang moneter, pengelolaan kebijakan moneter dihadapkan pada tantangan risiko meningkatnya tekanan inflasi, derasnya arus masuk modal asing, dan eksese likuiditas di sektor keuangan. Pada paruh pertama 2010, penerapan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif ditempuh untuk memperkuat arah pemulihan ekonomi nasional di tengah masih cukup rendahnya risiko tekanan inflasi dan dinamika perekonomian global yang kondusif. Namun, memasuki paruh kedua tahun 2010 gejala harga komoditas pangan yang melanda berbagai negara akibat dampak perubahan iklim, termasuk Indonesia, mulai mendorong naiknya risiko kenaikan tekanan inflasi. Di tengah derasnya arus masuk modal asing dan tingginya eksese likuiditas di sistem keuangan, kompleksitas penerapan kebijakan moneter semakin meningkat. Penggunaan instrumen suku bunga semata untuk meredam peningkatan risiko tekanan inflasi akan memiliki implikasi yang lebih luas. Dalam merespons hal tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang dikemas dalam suatu bauran kebijakan moneter dan makroprudensial.

<sup>12</sup> Inpres RI No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Secara umum, bauran kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga keseimbangan eksternal dan internal. Keseimbangan eksternal tercermin dari terjaganya kesinambungan neraca pembayaran, sementara keseimbangan internal tercapai melalui terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Penggunaan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh konsisten berada dalam kerangka kerja *inflation targeting framework* (ITF) dengan penerapan yang selaras antara pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan moneter yang tidak hanya merespons sisi permintaan melalui kebijakan suku bunga, namun juga disertai paduan instrumen kebijakan moneter lainnya sebagai sinyal pengetatan likuiditas merupakan cermin kebijakan dalam kerangka kerja ITF yang lebih fleksibel.

Di tataran operasional, penyempurnaan operasi moneter diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan sebagai respons perkembangan di pasar uang. Pada Juni 2010, Bank Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Penguatan Manajemen Moneter dan Pengembangan Pasar Keuangan. Langkah penerapan paket kebijakan ini merupakan respons dalam menghadapi tantangan derasnya aliran modal asing di tengah eksekusi likuiditas yang cenderung persisten dan masih rendahnya kedalaman pasar uang domestik. Selain itu, adanya kerentanan eksternal dari proses pemulihan ekonomi dan potensi ketidakstabilan di pasar keuangan, serta berbagai permasalahan struktural di sektor riil juga menjadi dasar penerbitan paket kebijakan tersebut. Penekanan pada upaya mendorong perbankan untuk lebih banyak bertransaksi di pasar sekunder dan mengalihkan profil jatuh waktu transaksi perbankan dengan Bank Indonesia ke tenor yang lebih panjang untuk menyerap kelebihan likuiditas yang tidak diperlukan merupakan bagian penting dari paket kebijakan ini.

Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas di pasar uang, Bank Indonesia menerapkan penyesuaian kebijakan GWM dan posisi saldo pinjaman luar negeri (PLN). Sejak November 2010, Bank Indonesia memberlakukan kenaikan GWM primer dari 5% menjadi 8%. Di samping itu, penerapan GWM sekunder sebesar 2,5% tetap berlaku. Bank Indonesia juga menerapkan aturan terkait GWM berdasarkan *loan to deposit ratio* (LDR) yang berlaku efektif pada Maret 2011. Sebagai bagian dari prioritas kebijakan Bank Indonesia<sup>13</sup>, GWM valuta asing akan ditingkatkan menjadi 5% pada Maret

2011 dan pada tahap selanjutnya menjadi 8% pada Juni 2011. Melengkapi aturan terkait pengelolaan likuiditas dan untuk meminimalkan risiko pembalikan keluar modal asing secara tiba-tiba, Bank Indonesia kembali memberlakukan kebijakan pembatasan kebijakan posisi saldo harian PLN jangka pendek maksimal 30% dari modal bank yang efektif berlaku pada akhir Januari 2011.

Di pasar uang valuta asing, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah derasnya aliran masuk modal asing. Kebijakan ini dilakukan melalui pengelolaan aliran modal masuk secara terukur dan terarah untuk memitigasi risiko pembalikan arah arus modal asing secara tiba-tiba. Kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi tetap ditempuh untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar. Melengkapi kebijakan stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan *one month holding period* (OMHP) SBI yang mewajibkan pembeli SBI untuk menahan kepemilikannya minimal satu bulan sebelum dijual kepada pihak lain. Bauran instrumen kebijakan tersebut dapat meminimalkan potensi risiko pembalikan arus modal dalam jumlah besar secara seketika. Penyempurnaan kegiatan pemantauan transaksi valuta asing<sup>14</sup> dan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank<sup>15</sup> juga ditempuh oleh Bank Indonesia untuk dapat mendukung otoritas moneter dalam memberikan respons kebijakan nilai tukar yang lebih antisipatif dan responsif.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi likuiditas valuta asing, Bank Indonesia meningkatkan kerjasama antar bank sentral negara kawasan. Implementasi perjanjian Chiang Mai Inisiatif Multilateralisasi (CMIM) antarnegara anggota ASEAN+3 efektif berlaku pada 24 Maret 2010. Perjanjian CMIM sebesar 120 miliar dolar AS ini merupakan perjanjian *multilateral swap* yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan, serta melengkapi kerjasama keuangan internasional yang telah ada. Diterapkannya perjanjian ini memungkinkan setiap anggota CMIM untuk melakukan *swap* mata uang lokal dengan dolar AS maksimum sejumlah kontribusi negara tersebut dikalikan dengan angka pengganda.

Bersamaan dengan penerapan perjanjian CMIM, untuk meningkatkan pengamanan terhadap risiko dan tantangan ekonomi global, negara-negara anggota

14 PBI No.12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

15 PBI No.12/1/PBI/ 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

13 Paket Kebijakan Bank Indonesia Desember 2010

ASEAN+3 berkomitmen untuk bersama-sama mendirikan *surveillance unit* kawasan yang bersifat independen. Selain itu, sebagai kelanjutan dari implementasi kerjasama *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* dengan People's Bank of China yang disepakati pada tahun 2009, Bank Indonesia menerbitkan aturan terkait mekanisme pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan diimplementasikannya kerjasama BCSA, ketersediaan valuta asing terutama untuk mendukung transaksi kegiatan ekonomi di sektor riil dapat lebih terjamin yang pada gilirannya berkontribusi positif bagi upaya menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.

Melengkapi upaya untuk mengarahkan inflasi kepada sasarannya, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus mendorong strategi pengendalian harga yang terkoordinasi di berbagai sisi. Meningkatnya intensitas gangguan di sisi pasokan yang memicu lonjakan harga pangan memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh dan saling bersinergi melalui rangkaian kebijakan yang diarahkan untuk meminimalkan tekanan tersebut. Bentuk koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang telah dirintis sejak tahun 2005, kembali dipertegas melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.796/KM.01/2010 tentang "Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi" atau yang lebih dikenal dengan TPI. Keberadaan TPI ini terus diperkuat dengan mendorong percepatan pembentukan TPI di berbagai daerah (TPID) dan hingga akhir 2010 telah terbentuk sebanyak 53 TPID.

## ■ Respons Kebijakan Perbankan dan Sistem Pembayaran

Di bidang perbankan, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan nasional dan mendorong peran intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya memperkuat struktur permodalan bank, Bank Indonesia melakukan pemantauan dan mendorong perbankan untuk dapat memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti bank sebesar Rp 100 miliar sebagaimana ditetapkan pada tahun 2005<sup>16</sup>. Beberapa penyempurnaan aturan juga dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain terkait sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum, penyempurnaan pelaporan dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta posisi devisa neto.

16 PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum sebagaimana diubah melalui PBI No.9/16/2007

Pengelolaan risiko yang optimal tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkompeten. Untuk itu, Bank Indonesia menyempurnakan aturan terkait sertifikasi manajemen risiko dan memperluas definisi sertifikasi manajemen risiko yang lebih mengacu pada standar yang berlaku luas secara internasional<sup>17</sup>. Penyempurnaan aturan terkait uji kemampuan dan kepatutan juga dilakukan oleh Bank Indonesia untuk lebih memastikan pengelolaan perbankan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik<sup>18</sup>. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan aturan teknis pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik di perbankan syariah<sup>19</sup>.

Melengkapi aturan untuk meningkatkan kemampuan dalam strategi pengendalian risiko yang dihadapi perbankan, penyempurnaan pelaporan dan pengaturan terkait RBB diberlakukan<sup>20</sup>. Penyempurnaan pelaporan bank dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia maupun kepada publik<sup>21</sup>. Pengaturan terkait RBB dilakukan selain sebagai sarana bagi bank dalam penetapan strategi bisnis dan pengukuran risiko strategis, bagi otoritas moneter RBB menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan pengawasan makroprudensial, serta menjadi acuan dalam penyusunan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif. Untuk meningkatkan efektivitas dan kerjasama pengawasan bank lintas batas negara (*cross border banking supervision*), Bank Indonesia pada 2010 menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Negara Malaysia<sup>22</sup>, China Banking Regulatory Commission<sup>23</sup>, dan Monetary Authority of Singapore<sup>24</sup>.

Penyempurnaan aturan terkait posisi devisa neto<sup>25</sup> ditempuh untuk lebih memberi ruang gerak kepada

17 PBI No.12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

18 PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

19 SE No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

20 PBI No.12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank

21 PBI No.12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

22 Juli 2010

23 April 2010

24 November 2010

25 PBI No.12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya terkait dengan pengelolaan likuiditas valuta asing, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Aturan terkait prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan aspek perlindungan nasabah juga menjadi dasar utama diterbitkannya PBI terkait keagenan produk luar negeri oleh perbankan nasional<sup>26</sup> dan aturan pelaksanaan manajemen risiko bagi bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*)<sup>27</sup>.

Di penghujung tahun 2010, Bank Indonesia menerapkan beberapa kebijakan lanjutan untuk mendorong peran intermediasi perbankan, memperkuat ketahanan perbankan, dan penguatan fungsi pengawasan. Upaya meningkatkan peran pembiayaan perbankan dalam perekonomian dilakukan antara lain dengan memberlakukan kewajiban untuk mengumumkan suku bunga dasar kredit kepada masyarakat yang berlaku efektif pada Maret 2011, pencanangan program Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah, dan program perluasan akses masyarakat kepada lembaga keuangan. Kebijakan lanjutan untuk meningkatkan ketahanan perbankan ditempuh antara lain melalui penyempurnaan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan, peningkatan fungsi kepatuhan bank umum, dan penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi. Untuk penguatan fungsi pengawasan, Bank Indonesia menyempurnakan sistem pengawasan bank berdasarkan risiko, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, dan penyempurnaan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko. Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana, Bank Indonesia memberlakukan aturan khusus bagi kredit di daerah bencana.

Penajaman kebijakan di bidang sistem pembayaran juga ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan penyelenggaraan sistem pembayaran, serta untuk mendukung penyempurnaan aturan di bidang moneter dan perbankan. Beberapa aturan di bidang sistem pembayaran yang diberlakukan pada tahun 2010 antara lain terkait dengan penyempurnaan penyelenggaraan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross*

*Settlement* (BI-RTGS)<sup>28</sup> untuk mengkomodifikasi penerapan mekanisme *payment versus payment* (PvP) pada transaksi perdagangan valuta asing antarbank. Mekanisme baru ini mendukung penyelesaian *settlement* sisi rupiah dan dolar AS yang dilakukan secara simultan. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk memitigasi risiko kredit melalui mekanisme kliring debit<sup>29</sup>. Selanjutnya, untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dan juga mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia, penyempurnaan terhadap aturan terkait Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) juga dilakukan. Penerbitan aturan ini memungkinkan bank untuk dapat menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) sebagai dasar untuk memperoleh FLI. Penyempurnaan terhadap alat pembayaran yang sah juga ditempuh untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat melalui penerbitan dan pencabutan uang pecahan tertentu. Pada tahun 2010, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap desain uang kertas pecahan Rp 10.000<sup>30</sup> dan menerbitkan uang logam pecahan Rp 1.000<sup>31</sup>, serta mencabut uang logam pecahan Rp 25 tahun emisi 1991<sup>32</sup>.

## ■ Respons Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada tahun 2010 tetap diarahkan untuk mempertahankan konsolidasi dan kesinambungan fiskal, serta memberikan stimulus kepada perekonomian. Guna mendukung upaya pemberian stimulus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melanjutkan program insentif fiskal dan menargetkan defisit APBN-P hingga mencapai 2,1% dari PDB. Berbagai stimulus diarahkan baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran. Di sisi penerimaan, pemberian insentif perpajakan dan bea masuk diharapkan mampu mendorong pemulihan dunia usaha. Sementara itu, di sisi pengeluaran Pemerintah melanjutkan program kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan anggaran

26 PBI No.12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

27 SE No. 12/ 35 /DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi

28 SE No.12/1/DASP tentang Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

29 PBI No.12/5/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

30 PBI No 12/8/PBI/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

31 PBI No.12/ 4 /PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2010

32 PBI No.12/14/PBI/2010 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 25 (Dua Puluh Lima) Rupiah Tahun Emisi 1991

Tabel 1.12 Realisasi APBN-P

RINCIAN	2009			2010		
	APBNP	Jan-Des	% APBNP	APBNP	Jan-Des	% APBNP
<b>A, Total Penerimaan dan Hibah</b>	<b>871,0</b>	<b>848,8</b>	<b>97,4</b>	<b>992,4</b>	<b>1,016,5</b>	<b>102,4</b>
I. Penerimaan Pajak	652,0	619,9	95,1	743,3	744,4	100,1
1. Pajak Dalam Negeri	631,9	601,3	95,1	720,8	715,5	99,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	20,0	18,7	93,2	22,6	28,9	127,9
II. Penerimaan Bukan Pajak	218,0	2,272,0	104,2	247,2	269,4	109,0
III. Hibah	1,0	1,7	165,6	1,9	2,8	146,8
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.000,8</b>	<b>937,4</b>	<b>93,7</b>	<b>1.126,1</b>	<b>1.056,5</b>	<b>93,8</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	691,5	628,8	90,9	781,5	711,8	91,1
1. Belanja Pegawai	133,7	127,7	95,5	162,7	147,8	90,8
2. Belanja Barang	85,5	80,7	94,4	112,6	96,0	85,3
3. Belanja Modal	73,4	75,9	103,4	95,0	77,0	81,0
4. Pembayaran Bunga Utang	109,6	93,8	85,6	105,7	88,3	83,6
5. Subsidi	158,1	138,1	87,3	201,3	214,1	106,4
6. Belanja Hibah	0	0	0	0,2	0,1	28,8
7. Bantuan Sosial	77,9	73,8	94,7	71,2	68,4	96,1
8. Belanja Lain-lain	53,3	38,9	73,0	32,9	20,1	61,1
II. Transfer ke Daerah	309,3	308,6	99,8	344,6	344,7	100,0
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>-20,3</b>	<b>5,1</b>		<b>-28,1</b>	<b>48,4</b>	
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>-129,8</b>	<b>-88,6</b>		<b>-133,7</b>	<b>-40,0</b>	
Surplus/(Defisit) % terhadap PDB	-2,4	-1,6		-2,1	-0,6	

Sumber: Kementerian Keuangan

pertahanan negara, dan mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja negara, serta mempertahankan pendapatan riil aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke-13. Dalam upaya untuk mempertahankan kesinambungan fiskal, Pemerintah mengedepankan pengelolaan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, penerapan kenaikan beberapa tarif serta pengurangan subsidi juga dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam realisasinya, penerimaan mengalami peningkatan sementara realisasi belanja berada di bawah target. Kondisi ini menyebabkan realisasi defisit APBN-P lebih rendah dari yang direncanakan. Penerimaan negara melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai Rp 1.016,5 triliun (102,4% dari APBN-P), sementara realisasi belanja negara sebesar Rp 1.056,5 triliun atau berada di bawah target (93,8% dari target APBN-P). Kondisi ini secara keseluruhan menyebabkan defisit fiskal sebesar Rp 40 triliun atau hanya mencapai 0,6% dari PDB, jauh berada di bawah target awal yang sebesar 2,1% PDB. Dengan defisit yang

rendah tersebut, Pemerintah memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2010 yang diperkirakan mencapai Rp 47,1 triliun. Rendahnya realisasi defisit fiskal ini menyebabkan kontribusi fiskal ke sektor riil yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2009.

Di sisi pembiayaan, strategi yang ditempuh diarahkan pada upaya menjaga kesinambungan fiskal. Strategi pembiayaan yang ditempuh pada dasarnya melanjutkan penerapan strategi tahun 2009, yaitu antara lain melalui penerapan strategi penerbitan SBN dengan jumlah yang lebih besar di awal tahun (*front loading*), dan pengelolaan portofolio melalui strategi *buyback* dan *debt switching*. Keberhasilan implementasi penerapan strategi *front loading* pada tahun 2009 berlanjut pada penerbitan SBN tahun 2010 disertai imbal hasil yang cenderung menurun pada setiap lelang. Pada tahun 2010, penerbitan SBN mencapai Rp 161,9 triliun atau 91,3% dari target APBN-P. Realisasi defisit APBN-P yang berada di bawah target awal, menyebabkan Pemerintah memiliki kelebihan dana yang dimanfaatkan untuk pengelolaan portofolio SBN melalui *buyback* dan *debt switching* dalam rangka mengurangi beban

pembiayaan dan memperbaiki *maturity profile*. Sepanjang tahun 2010, Pemerintah telah melakukan 13 kali *buyback* dengan total nilai sebesar Rp 3,2 triliun dan 6 kali *debt switching* sebesar Rp 3,9 triliun.

## ■ Respons Kebijakan Sektoral

Dalam upaya memperkuat daya dukung perekonomian nasional di tengah berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan sektoral. Kebijakan terutama ditekankan pada pembenahan struktural guna meningkatkan kapasitas perekonomian melalui penyediaan infrastruktur strategis, khususnya yang terkait dengan konektivitas domestik, ketahanan energi, dan peningkatan iklim investasi<sup>33</sup>. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pada akhir Januari 2010 Pemerintah mulai mengoperasikan perusahaan persero yang khusus menangani pembiayaan pembangunan infrastruktur. Bersamaan dengan beroperasinya perseroan tersebut Pemerintah menetapkan skema pembiayaan bersama untuk program pembangunan antar-Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar-Pemerintah dan pihak swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berbagai aturan dan strategi untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui penyempurnaan aturan terkait tata cara pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan pelaksanaan APBN/APBD<sup>34</sup> beserta aturan pendukung terkait percepatan proses pengajuan dan penyelesaian tagihan atas beban APBN<sup>35</sup>. Di bidang energi, pemerintah telah memiliki rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional tahun

2010-2025<sup>36</sup> dan melakukan berbagai langkah strategis untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik terutama yang menggunakan energi terbarukan, gas, dan batu bara. Sementara itu, untuk mendorong iklim investasi pemerintah antara lain menerapkan sistem pelayanan kepelabuhanan terintegrasi *national single window* di lima pelabuhan utama<sup>37</sup>, mendorong penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi kegiatan penanaman modal di berbagai daerah, pengembangan kawasan ekonomi khusus<sup>38</sup>, dan menyempurnakan Daftar Negatif Investasi<sup>39</sup> untuk memberikan kemudahan, kepastian dan daya tarik investasi dan meningkatkan iklim investasi.

Meningkatnya harga pangan direspons oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Penyelenggaraan operasi pasar beras terus dilakukan untuk dapat meredam kenaikan harga beras disertai dengan penyaluran beras untuk rakyat miskin dan strategi untuk memperkuat cadangan beras nasional. Pada akhir tahun 2010 Pemerintah mengambil kebijakan untuk sementara waktu membebaskan tarif bea masuk impor beras<sup>40</sup>. Peningkatan koordinasi lintas instansi dan daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di tingkat pusat maupun daerah, ditempuh melalui upaya pemetaan dan pemantauan kondisi stok pangan antardaerah, meminimalkan hambatan distribusi logistik, dan meningkatkan informasi harga dan ketersediaan bahan pokok kepada masyarakat.

33 Merupakan bagian dari prioritas kebijakan di bidang ekonomi dalam Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

34 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus 2010

35 Peraturan Menteri Keuangan No.170/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

36 Keputusan Menteri ESDM No.0225K/11/MEM/2010 tanggal 27 Januari 2010

37 Pelabuhan Belawan, Tanjung Periok, Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Bandara Soekarno-Hatta

38 Sebagai tindak lanjut penerapan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pada Mei 2010 Pemerintah membentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

39 Perpres 36/2010 menggantikan Perpres 77/2007 dan Perpres 111/2007

40 PMK No. 241/PMK.011/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

## BOKS 1.1: Akuntabilitas Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2010

Inflasi IHK pada tahun 2010 tercatat 6,96%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar  $5\% \pm 1\%$ <sup>1</sup>. Sampai dengan pertengahan tahun 2010, stabilitas harga masih cukup terjaga yang tercermin dari inflasi yang relatif rendah 5,05%. Namun, memasuki triwulan III 2010, intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan, meningkat tajam akibat anomali cuaca baik di tingkat global maupun domestik. Dengan kondisi tersebut, harga komoditas pangan di pasar global melonjak tajam dan dalam waktu yang bersamaan harga-harga komoditas tersebut di pasar domestik juga meningkat tinggi. Dengan demikian, terlampainya target inflasi tersebut lebih disebabkan oleh tingginya gejolak harga pada kelompok *volatile food*. Sementara itu, tekanan inflasi yang bersumber dari kelompok barang yang harganya dikendalikan pemerintah (*administered prices*) menunjukkan inflasi yang moderat, sedangkan tekanan inflasi inti yang mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran agregat sejauh ini masih terkendali pada tingkat yang cukup rendah.

Tingginya gejolak harga bahan pangan yang rentan terhadap gangguan iklim menyebabkan kelompok *volatile food* mencatat inflasi yang sangat tinggi. Anomali iklim berupa curah hujan tinggi dan permasalahan terkait distribusi menyebabkan sejumlah komoditas pangan domestik seperti beras, aneka bumbu dan aneka sayur mengalami gangguan pasokan yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga yang sangat tinggi. Kenaikan inflasi *volatile food* yang cukup tajam tersebut juga dialami oleh beberapa negara di kawasan. Selain itu, kenaikan harga pangan global yang cukup signifikan pada semester II 2010 sebagaimana terjadi pada komoditas *Crude Palm Oil* (CPO), gandum, dan jagung turut mendorong tekanan inflasi pangan domestik, meskipun pengaruhnya diminimalkan oleh apresiasi nilai tukar

rupiah. Secara keseluruhan, inflasi kelompok *volatile food* memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi IHK tahun 2010 yakni sebesar 3,13%. Inflasi kelompok *volatile food* yang mencapai 17,74% tersebut jauh lebih tinggi dari rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 9%.

Sementara itu, kebijakan *administered prices* pada komoditas strategis berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) memberikan dampak moderat pada tekanan inflasi tahun 2010. Kebijakan pemerintah menaikkan TDL kelompok rumah tangga untuk golongan daya listrik di atas 900 kilovolt-ampere (kVA) dan kelompok bisnis telah diantisipasi dunia usaha. Hal tersebut menyebabkan dampak kenaikan TDL ke inflasi IHK cukup moderat, yaitu memberikan sumbangan langsung ke inflasi sebesar 0,38% dan tidak memberikan dampak lanjutan pada ekspektasi inflasi secara signifikan. Sumber tekanan inflasi yang cukup besar pada kelompok *administered prices* pada tahun 2010 berasal dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan jasa pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang cukup besar, masing-masing sekitar 75% dan 48%, sehingga memberikan sumbangan ke inflasi IHK sebesar 0,24%. Untuk keseluruhan tahun 2010, inflasi kelompok *administered prices* mencapai 5,40%, atau memberikan sumbangan inflasi 0,99%. Angka realisasi inflasi kelompok *administered price* tersebut cukup rendah mengingat rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir mencapai sekitar 13%.

Di sisi lain, tekanan inflasi dari sisi fundamental masih terkendali. Hal tersebut ditunjukkan oleh indikator inflasi inti pada tahun 2010 yang mencatat sedikit peningkatan tetapi masih lebih rendah dari prakiraan semula. Kondisi ini mencerminkan bahwa keseimbangan makroekonomi secara umum dapat dijaga dengan cukup baik sehingga akselerasi di sisi permintaan dapat dikendalikan sesuai dengan kemampuan di sisi suplai serta terjaganya ekspektasi inflasi. Selain itu, faktor penting yang turut mendukung terkendalinya tekanan inflasi inti antara lain penguatan nilai tukar rupiah disertai volatilitas yang menurun. Apresiasi rupiah tersebut meminimalkan dampak kenaikan harga komoditas global (*imported inflation*) dan menjaga ekspektasi inflasi pelaku ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pada akhir tahun

1 Sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah atas masukan Bank Indonesia. Sasaran inflasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1/KMK.011/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2008, 2009 dan 2010. Sasaran inflasi tersebut ditetapkan secara berkala untuk mengakomodir target inflasi periode tiga tahun berikutnya. Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.143/PMK.011/2010 tanggal 24 Agustus 2010, yakni dengan tren menurun sebesar 5% untuk tahun 2010 dan 2011, dan 4,5% untuk tahun 2012 dengan batas toleransi (*point with deviation*) sebesar  $\pm 1\%$ .

2010 inflasi inti tercatat 4,28% (yoy) atau memberikan sumbangan inflasi IHK sebesar 2,8%. Angka realisasi inflasi inti tersebut sudah cukup rendah dibandingkan rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 7,5%.

Besarnya pengaruh gangguan (*shocks*) di sisi suplai menyebabkan proyeksi secara akurat pada kelompok inflasi *volatile food* menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Hal tersebut mengingat perkembangan inflasi kelompok tersebut sangat dipengaruhi oleh gangguan pasokan (*supply shocks*) yang seringkali berada di luar kendali bank sentral, seperti contoh tahun 2010 yang banyak dipengaruhi oleh faktor anomali cuaca dan bencana alam di sejumlah wilayah tanah air. Menghadapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan sesuai kewenangannya, serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah mengingat sumber tekanan inflasi terutama berasal dari gangguan di sisi suplai kelompok bahan makanan.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia selama tahun 2010 telah menempuh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks dan multidimensi akibat derasnya arus masuk modal asing, besarnya ekseks likuiditas dan meningkatnya tekanan inflasi di dalam negeri. Oleh karena itu, pilihan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pada satu instrumen saja. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan (*policy mix*) yang diwujudkan dalam empat kebijakan yaitu: 1) Kebijakan suku bunga BI Rate diarahkan untuk pencapaian sasaran inflasi dan kondusif bagi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi; 2) Kebijakan stabilisasi nilai tukar untuk menjaga volatilitas rupiah dan pergerakan nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan perekonomian dalam menghadapi risiko pembalikan modal asing (*self insurance*); 3) Kebijakan makroprudensial terhadap *capital inflows*, khususnya yang berjangka pendek dan spekulatif agar tidak menimbulkan instabilitas dan dapat didorong ke jangka yang lebih panjang; 4) Penguatan operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas agar perkembangannya tetap sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Sepanjang tahun 2010, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 6,5% yang lebih didasari oleh pertimbangan bahwa sumber tekanan inflasi terutama pada sisi suplai perekonomian akibat terganggunya pasokan dan permasalahan distribusi bahan pangan. Di sisi permintaan domestik, berbagai indikator menunjukkan indikasi awal pemulihan ekonomi dengan struktur yang lebih kuat dimana kenaikan konsumsi diikuti oleh perbaikan investasi. Bank Indonesia memandang pentingnya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang terjadi.

Upaya memengaruhi ekspektasi inflasi menuju ke sasarannya juga merupakan langkah yang sangat penting. Selain melalui upaya menjaga kestabilan nilai tukar, upaya terkait hal ini juga dilakukan dengan memperkuat komunikasi kebijakan moneter melalui berbagai media seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pimpinan/CEO perusahaan, pengamat ekonomi, dan analis pasar keuangan. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia dapat menjelaskan pandangannya mengenai kondisi terkini dan prospek perekonomian serta arah kebijakan ke depan selain juga mendapatkan masukan mengenai perkembangan di sektor riil. Upaya mengarahkan inflasi diperkuat oleh intensifnya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mengendalikan inflasi.

Koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah tersebut diperkuat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sejak tahun 2005 telah dibentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dengan anggota Bank Indonesia dan beberapa institusi terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meningkatnya tekanan inflasi dari sisi suplai mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat pengendalian inflasi dengan dukungan dari pemerintah daerah. TPID mulai dibentuk di sejumlah daerah pada tahun 2008 dan sejauh ini mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai daerah sehingga saat ini telah terbentuk di 53 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peran TPI dan TPID diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menyebabkan tingginya inflasi yang bersumber dari gangguan di sisi suplai. Secara garis besar, berbagai kegiatan dan program yang dilakukan selama tahun 2010 dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Kegiatan pertama terkait perbaikan distribusi, pasokan dan pembentukan ekspektasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain mendorong pelaksanaan operasi pasar di sejumlah daerah serta strategi komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi inflasi melalui penguatan diseminasi kepada media. Kegiatan kedua terkait dengan penguatan koordinasi, ditempuh antara lain melalui meningkatkan aliran informasi dan data antarwilayah yang diperlukan dalam perumusan kebijakan stabilisasi harga di daerah. Kegiatan ketiga terkait dengan kegiatan pendukung yakni dengan mengembangkan basis data harga komoditas strategis di setiap kota yang telah terbentuk TPID. Ketersediaan data dan informasi harga ini sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga.

Koordinasi dengan Pemerintah juga diperkuat dalam bentuk peningkatan kerjasama di bidang statistik antara Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama yang disepakati pada akhir November 2010 tersebut mencakup tiga hal, yakni pertukaran, perolehan, dan penyusunan data/informasi; forum koordinasi data/informasi; dan peningkatan sumber daya manusia. Kerjasama tersebut sangat diperlukan mengingat data/informasi khususnya data sektor riil baik di tingkat pusat maupun daerah dari BPS sangat penting dalam pengambilan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran yang berguna bagi kepentingan nasional. Sebaliknya, data/informasi keuangan dan moneter dari Bank Indonesia juga diperlukan BPS untuk disajikan kembali bagi Pemerintah dan masyarakat luas.

## BOKS 1.2: Anomali Cuaca dan Produksi Bahan Pangan

Inflasi kelompok bahan makanan yang bergejolak (*volatile foods*) tahun 2010 tercatat tinggi, yaitu 17,74%, jauh di atas rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir yakni 9%. Inflasi kelompok *volatile foods* ini lebih banyak didorong oleh faktor cuaca. Sejak Juli 2010, komoditas yang rentan terhadap pengaruh iklim, seperti beras, aneka bumbu, aneka buah, dan aneka sayur, tercatat mengalami lonjakan harga yang signifikan. Tingginya inflasi di kelompok ini pada tahun laporan disebabkan adanya anomali cuaca, yaitu La Nina.

La Nina merupakan fenomena alam global yang ditandai dengan kondisi suhu muka laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur berada di bawah nilai normalnya, sementara kondisi suhu muka laut di perairan Indonesia berada di atas nilai normalnya (hangat)<sup>1</sup>. Turunnya suhu permukaan laut di perairan Samudra Pasifik tersebut menyebabkan berpindahnya *warm pool* (kolam hangat) dari perairan Samudra Pasifik ke perairan Indonesia. Fenomena cuaca ini telah menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat dan bergesernya musim kemarau. Curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang telah memicu terjadinya sejumlah bencana banjir, tanah longsor dan terjangan angin puting beliung di beberapa daerah yang semestinya sedang mengalami cuaca kering akibat kemarau. Sejak Juli 2010,

1 La Nina merupakan kebalikan dari El Nino yang ditandai oleh meningkatnya suhu muka laut di perairan Samudera Pasifik dan berdampak pada terjadinya musim kemarau yang kering dan panjang di Indonesia.

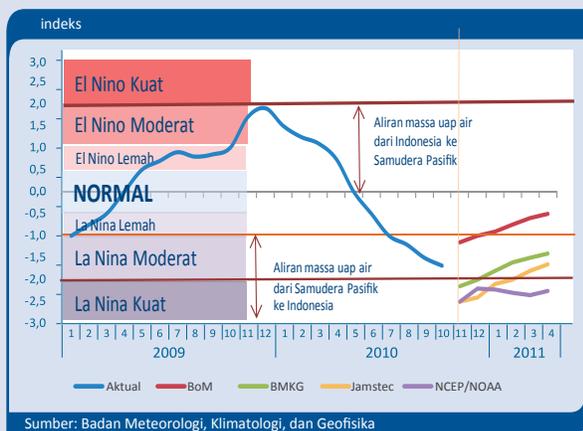
intensitas La Nina menunjukkan tingkat yang moderat hingga kuat (Grafik 1).

Pergeseran musim tersebut menyebabkan produksi di sektor pertanian mengalami kendala. Tanaman menjadi mudah rusak dan lebih rentan terhadap hama, serta kualitas hasil tanaman menurun. Hal tersebut secara keseluruhan menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman dan naiknya harga bahan makanan<sup>2</sup>.

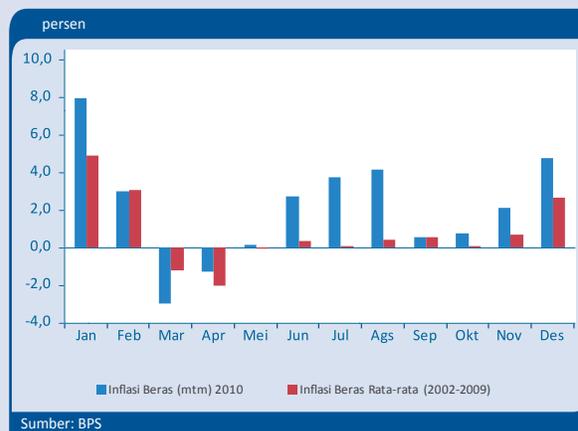
Komoditas yang mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi pada kelompok ini adalah beras<sup>3</sup>. Banyaknya areal persawahan yang terkena curah hujan di atas normal telah menyebabkan terbatasnya kenaikan produksi beras sehingga harga beras terus mengalami peningkatan dan memberikan tekanan yang besar terhadap inflasi memasuki akhir tahun 2010. Inflasi komoditas beras pada tahun 2010 ini (30,4%)<sup>4</sup> jauh lebih tinggi dari pola historisnya (12,4%)<sup>4</sup> (Grafik 2). Sebagai respons dari kenaikan harga ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga beras ini melalui operasi pasar dan impor (Grafik 3).

Beberapa faktor lain yang menghambat peningkatan produksi beras adalah kurang terpeliharanya

2 Kenaikan harga bahan pangan akibat gangguan cuaca tidak hanya terjadi Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara kawasan.  
3 Bobot beras dalam keranjang Indeks Harga Konsumen adalah 4,58%.  
4 Rata-rata inflasi beras (yoy) selama tahun 2003-2009.



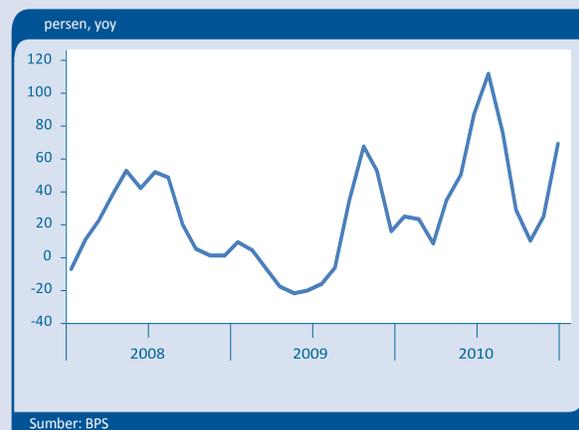
Grafik 1. Indeks Nino



Grafik 2. Inflasi Beras tahun 2010

infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan meningkatnya konversi pemanfaatan lahan pertanian seiring dengan pesatnya urbanisasi. Sementara itu, usaha untuk memperbaiki infrastruktur yang lama dan membangun infrastruktur baru menghadapi berbagai tantangan, seperti anggaran yang terbatas, masalah pembebasan lahan, dan lingkungan yang rusak.

Komoditas lain yang memberikan dampak cukup signifikan pada inflasi bahan makanan yang berkejang sepanjang tahun 2010 adalah aneka bumbu (Grafik 3). Selain gagal panen, teknologi pengeringan yang masih konvensional dan penanganan hama tanaman yang belum optimal ikut andil dalam mendorong kenaikan harga komoditas ini. Meskipun dampak kenaikan harga pada komoditas bumbu-bumbuan terhadap komoditas turunannya, seperti makanan jadi, cukup moderat, kenaikan harga pada komoditas ini dan kelompok *volatile*



**Grafik 3. Inflasi Empat Komoditas Bumbu**  
(Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih)

*foods* pada umumnya telah memicu naiknya ekspektasi inflasi secara keseluruhan sehingga mendorong peningkatan harga lebih lanjut pada komoditas lainnya.

## Terus bertumbuh karena terjaga

Hujan atau cerah hari, hanya bisa diprediksi. Bibit mulai tumbuh dengan akar dan batang yang masih rapuh, mungkin akan terpengaruh. Namun satu yang pasti bahwa untuk menghadapi apapun yang terjadi adalah tetap mawas diri.



